



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 32 TAHUN 2019**

TENTANG

PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa klasifikasi arsip sangat diperlukan sebagai instrument dalam pengelolaan arsip dinamis untuk memfasilitasi penciptaan, akses dan penggunaan, serta penyusutan arsip;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien, perlu disusun klasifikasi arsip Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Klasifikasi Arsip;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282);
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1953);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 38);
13. Peraturan Bupati Balangan Nomor 24 tahun 2018 tentang Pedoman Tata Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan.
5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
7. Klasifikasi adalah penggolongan naskah atau arsip berdasarkan masalah yang termuat di dalamnya dan merupakan pedoman untuk pengaturan penataan dan penemuan kembali arsip.
8. Klasifikasi masalah adalah penggolongan arsip yang didasarkan atas isi masalah yang terdapat di dalam arsip.
9. Kode Klasifikasi arsip adalah merupakan bagian dari klasifikasi arsip yang menjadi tanda pengenal urusan dalam bentuk angka yang berfungsi sebagai penuntun terhadap letak berkas di tempat penyimpanannya.
10. Kode Komponen adalah tanda pengenal komponen unit pengolah yang mengolah atau menangani naskah dinas dan ditulis dengan huruf ditempatkan dibelakang nomor urut.
11. Kode Pembantu adalah kode pelengkap yang tidak dapat dipakai tersendiri yang merupakan bentuk penyajian dari masalah tertentu yang merupakan aspek yang selalu timbul berkaitan dengan masalah lainnya dan ditulis ditambahkan di belakang kode yang memerlukan perincian lebih lanjut.
12. Indek adalah petunjuk atau tanda pengenal, sebagai alat untuk menunjukkan isi masalah (topik) perihal suatu dokumen atau sekelompok dokumen/berkas.
13. Kartu Tunjuk Silang adalah formulir yang dipergunakan untuk memberi petunjuk tentang adanya lebih dari satu masalah pada satu naskah dinas dan sebagai sarana petunjuk tentang adanya hubungan dengan file yang lainnya



BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Pedoman Klasifikasi Arsip adalah sebagai pedoman pengelompokan arsip secara logis dan sistematis yang menjadi tanda pengenal urusan dalam bentuk angka yang berfungsi sebagai penuntun terhadap letak berkas di tempat penyimpanannya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi Klasifikasi Arsip dengan kode klasifikasi arsip sebagai berikut:

- a. 000 Umum
- b. 100 Pemerintahan;
- c. 200 Politik;
- d. 300 Keamanan/Ketertiban;
- e. 400 Kesejahteraan Rakyat;
- f. 500 Perekonomian;
- g. 600 Pekerjaan Umum dan Ketenagaan;
- h. 700 Pengawasan;
- i. 800 Kepegawaian; dan
- j. 900 Keuangan.

BAB IV KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 4

- (1) Klasifikasi Arsip meliputi perincian kesatu, perincian kedua dan perincian ketiga.
- (2) Klasifikasi Arsip disusun berdasarkan masalah yang mencerminkan fungsi dan kegiatan melaksanakan tugas di lingkungan pemerintahan daerah.
- (3) Klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin

Pada Tanggal 18 Juli 2019

BUPATI BALANGAN,



Diundangkan di Paringin,
pada tanggal 18 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. RUSKARIADI

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Iwan Setiady".

**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 32 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP

A. BENTUK DAN SUSUNAN POLA KLASIFIKASI

1. Klasifikasi Arsip disusun secara berjenjang dengan menggunakan prinsip perkembangan dari umum kepada khusus dalam hubungan masalah, didahului oleh 3 (tiga) perincian dasar, masing-masing perincian pertama, perincian kedua dan perincian ketiga sebagai pola dasar yang berfungsi sebagai jembatan penolong dalam menemukan kode masalah yang tercantum dalam pola klasifikasi;
2. Kode adalah tanda pengenal masalah seperti yang tercantum dalam pola klasifikasi;
3. Kode Klasifikasi adalah merupakan bagian dari klasifikasi arsip yang menjadi tanda pengenal urusan dalam bentuk angka yang berfungsi sebagai penuntun terhadap letak berkas ditempat penyimpanannya;
4. Kode komponen adalah tanda pengenal komponen unit pengolah yang mengolah/menangani naskah dinas dan ditulis dengan huruf ditempatkan dibelakang nomor urut;
5. Kegiatan fasilitatif adalah kegiatan penunjang untuk membantu memperlancar tugas pokok dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan suatu instansi;
6. Kegiatan Substantif adalah kegiatan yang menyangkut fungsi dan tugas pokok organisasi yang bersangkutan dan bersifat operasional, kegiatan substantif ini membedakan antara organisasi satu dengan yang lainnya;
7. Angka 100 sampai dengan 600 merupakan kode tugas-tugas substantif, sedangkan angka 000, 700, 800 dan 900 merupakan kode tugas-tugas fasilitatif. Kode 000 menampung masalah-masalah fasilitatif di luar pengawasan, kepegawaian dan keuangan. Disamping itu juga ditampung masalah-masalah yang berkaitan dengan kerumah tanggaan, seperti protocol urusan dalam dan masalah yang tidak dapat dimasukan dalam kelompok lainnya, seperti perjalanan dinas, peralatan, lambing Negara atau Daerah, tanda-tanda kehormatan dan sebagainya.
8. Sepuluh pokok masalah tersebut telah menampung seluruh kegiatan pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah Kabupaten termasuk instansi – instansi dalam lingkungannya.
Sepuluh pokok masalah yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:
 - a. 000 Umum;
 - b. 100 Pemerintahan;
 - c. 200 Politik;
 - d. 300 Keamanan dan Ketertiban;
 - e. 400 Kesejahteraan;



- f. 500 Perekonomian;
 - g. 600 Pekerjaan Umum dan Ketenagaan;
 - h. 700 Pengawasan;
 - i. 800 Kepegawaian;
 - j. 900 Keuangan.
9. Kode pembantu merupakan penyajian dari masalah tertentu yang merupakan aspek yang selalu timbul berkaitan dengan masalah lainnya, ditambahkan di belakang tiap kode yang memerlukan perincian lebih lanjut, untuk dapat memberikan dimensi ekstra pada arsip. Kode pembantu dimaksud tersebut adalah:
- a. 01 Perencanaan;
 - b. 02 Penelitian;
 - c. 03 Pendidikan;
 - d. 04 Laporan;
 - e. 05 Panitia;
 - f. 06 Seminar, Lokakarya, Workshop;
 - g. 07 Statistik;
 - h. 08 Peraturan perundang-undangan;
 - i. 09

B. CARA PENGGUNAAN

1. Untuk memahami pola klasifikasi terlebih dahulu harus memahami perincian pertama, kedua dan ketiga. Selanjutnya perlu memahami hubungan antar masalah dan anak masalahnya pada pola dengan memperhatikan efek dengan prinsip berjenjang. Tiap kode, kecuali kode masalah yang pokok pada perincian pertama merupakan bagian dan sub ordinat dari kode atasannya. Untuk mendapatkan gambaran yang benar masalah 412.31 harus diketahui bahwa masalah ini merupakan bagian dari 412.3 selanjutnya diketahui bahwa 412.3 merupakan bagian dari 412, 412 bagian dari 410 dan 410 bagian dari 400. Disamping itu perlu diperhatikan khusus klasifikasi 400 Contoh :
 - a. 400 Kesejahteraan Rakyat (Perincian pertama);
 - b. 410 Bangunan Desa/Kelurahan (Perincian Kedua);
 - c. 412 Perekomian Desa (Perincian Ketiga);
 - d. 412.3 Koperasi Desa (Perincian Keempat);
 - e. 412.31 Badan Usaha Unit Desa (Perincian Kelima).
2. Untuk dapat mengklasifikasi surat dengan kode yang paling tepat harus dipahami benar masalah yang dikandungnya, dari sudut pandangan mana masalah dalam surat tidak selalu mudah, pada umumnya "perihal" surat yang dicantumkan di bagian kiri atas surat memang ada hubungannya dengan masalah surat, tetapi kerap kali "perihal" tersebut merupakan petunjuk yang kurang tepat. Oleh karena itu untuk menentukan kode yang tepat, harus membaca dan memahami masalah yang dikandung dalam surat. Harus selalu diingat,



bahwa penemuan kembali surat banyak sekali tergantung pada ketepatan pemberian kode.

3. Banyak surat yang mengandung lebih dari satu masalah. Masalah-masalah itu dapat merupakan masalah yang terpisah satu sama lain atau masalah-masalah yang saling berkaitan. Dalam menghadapi hal yang demikian itu harus berhati-hati memilih masalah yang akan ditentukan menjadi masalah pokok. Masalah yang dipilih haruslah yang paling berat tekanannya, dan harus diyakini benar, bahwa itulah yang akan dikemukakan dalam penemuan kembali arsip.

4. Kode Pembantu

Kode Pembantu merupakan kode pelengkap yang tidak dapat dipakai tersendiri, tetapi ditambahkan kode yang memerlukan perincian lebih lanjut. Dengan ditambahkannya kode pembantu, maka dapat memberikan dimensi ekstra pada arsip. Contoh:

- a. 591 Tata Guna Tanah;
02 Kode pembantu penelitian;
- b. 591.02 Penelitian tata guna tanah;
- c. 428 Kepemudaan;
06 Kode Pembantu Seminar;
- d. 428.06 Seminar Kepemudaan.

5. Menyusun Kode

Untuk memperoleh Kode yang spesifik, kode-kode masalah yang satu dapat digabungkan dengan kode-kode masalah yang lain. Cara penggabungan ini dapat dilihat contohnya pada kode 050 dan 700. Perencanaan maupun proyek pembangunan dapat meliputi semua bidang kegiatan, oleh karena itu untuk memperoleh kode yang terperinci maka kode 050 dapat disambungkan dengan seluruh perincian kode dengan pola dari 000 sampai 900. Begitu juga pengawasan (700) yang meliputi bidang apapun dapat digabungkan dengan perincian kode dalam pola klasifikasi.

6. Apabila pada kode ada petunjuk "tambahan perincian" berarti harus menambahkan kode dari pola yang satu ke kode - kode pola yang lain

Contoh I : Proyek Pasar

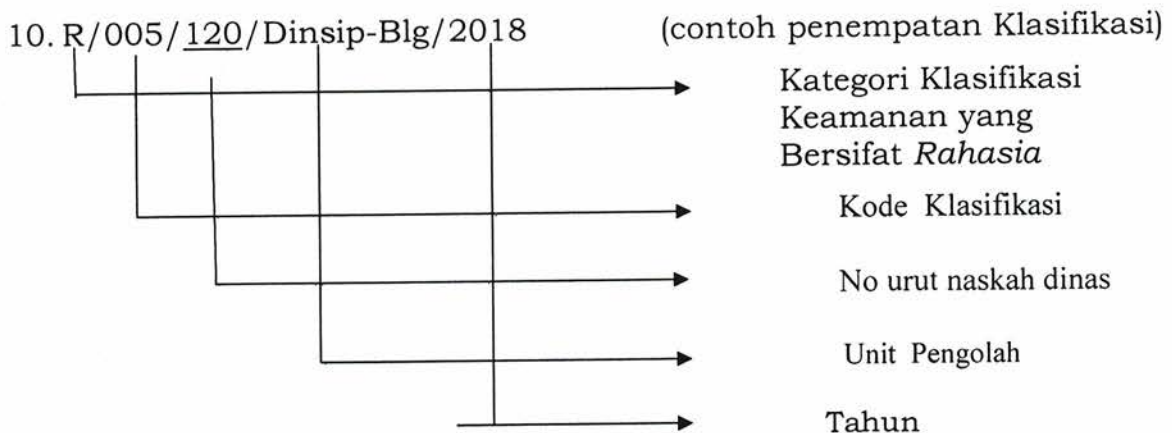
- 055 - Proyek bidang perekonomian)
511.2 - Pasar (Bidang Perekonomian)
055.112 - Proyek Pasar

Contoh II : Proyek Jembatan

- 056 - Proyek bidang pekerjaan umum
630 - Jembatan (Bidang Pekerjaan Umum)
056.3 - Proyek Jembatan. Angka 0 paling belakang sesuai. Titik desimal dihilangkan.



7. Ada beberapa masalah yang dapat diklasifikasikan dengan dua macam kode, dan 2 kode yang berlainan itu benar. Peraturan pemerintah tentang pensiun, bisa diklasifikasikan dengan kode 188.31 Peraturan Pemerintah atau 882.08 Peraturan tentang Pensiun. Masalah pemberhentian dengan pensiun (882), ditambah dengan kode pembantu untuk Peraturan Perundang-undangan (08). Penelitian penghasilan Pamong desa, dapat diklasifikasi 070 (Penelitian) atau 142.02 (Penelitian penghasilan pamong desa) (142) ditambah dengan kode pembantu untuk penelitian (02). Kedua cara pengklasifikasian ini sama-sama benar. Hal ini dimaksud untuk memberikan keleluasan pada penataan berkas. Jika penataan berkas akan dilakukan dengan cara mengelompokkan semua jenis Peraturan Pemerintah, atau semua kegiatan penelitian, maka arsip diklasifikasikan tanpa kode pembantu, tetapi jika penataan berkas dilakukan berdasarkan masalah, maka yang diklasifikasikan ialah masalahnya ditambah kode pembantu.
8. Tunjuk Silang Jika dijumpai surat yang mengandung dua masalah dan masalah tersebut dan mempunyai tekanan yang sama beratnya, maka dapat diatasi dengan jalan membuat Kartu Tunjuk Silang. Surat tersebut diklasifikasikan dengan dua kode: Satu kode diisikan pada Kartu Kendali, dan satu kode lagi diisikan pada kartu tunjuk silang. Dengan demikian maka penemuan kembali surat dimaksud dapat dilakukan dari dua arah.
Contoh: Surat tentang "Persawahan untuk transmigrasi" dapat diberikode 521.5 (Persawahan) dengan menunjuk kode 475 (Transmigrasi) atau sebaliknya. Perlu diperhatikan bahwa penggunaan Tunjuk Silang terbatas pada masalah-masalah yang memang sangat penting.
9. Indeks Kaitan
Untuk memudahkan menelusuri kode-kode, disusun indeks kaitan. Indeks kaitan ini terdiri dari himpunan nama-nama masalah dan kaitannya yang terdapat dalam pola klasifikasi yang disusun dalam urutan abjad dengan diikuti kodenya. Dalam indeks kaitan letak kode ada dibelakang masalah, sedangkan dalam pola klasifikasi ada di depan indeks kaitan dimaksud untuk memudahkan mencari masalah dalam arsip.



C. PERINCIAN KODE KLASIFIKASI DAN INDEKS KAITAN

1. Perincian pertama:

- a. 000 Umum;
- b. 100 Pemerintahan;
- c. 200 Politik;
- d. 300 Keamanan/Ketertiban;
- e. 400 Kesejahteraan Rakyat;
- f. 500 Perekonomian;
- g. 600 Pekerjaan Umum dan Ketenagaan;
- h. 700 Pengawasan;
- i. 800 Kepegawaian;
- j. 900 Keuangan.

2. Perincian kedua:

- a. 000 UMUM;
- b. 010 Urusan Dalam;
- c. 020 Peralatan;
- d. 030 Kekayaan Daerah;
- e. 040 Perpustakaan/ Dokumentasi/ Kearsipan/ Sandi;
- f. 050 Perencanaan;
- g. 060 Organisasi/ Ketatalaksanaan;
- h. 070 Penelitian;
- i. 080 Konferensi;
- j. 090 Perjalanan Dinas;
- k. 100 Pemerintahan;
- l. 110 Pemerintahan Pusat;
- m. 120 Pemerintahan Provinsi;
- n. 130 Pemerintahan Kabupaten/ Kota;
- o. 140 Pemerintahan Desa/ Kelurahan;
- p. 150 DPR/ MPR;
- q. 160 DPRD Provinsi;
- r. 170 DPRD Kabupaten/ Kota;
- s. 180 Hukum;
- t. 190 Hubungan Luar Negeri;
- u. 200 Politik;
- v. 210 Kepartaian;
- w. 220 Organisasi Kemasyarakatan;
- x. 230 Organisasi Profesi dan Fungsional;
- y. 240 Organisasi Pemuda;
- z. 250 Organisasi Buruh, Tani dan Nelayan;
- aa. 260 Organisasi Wanita;
- bb. 270 Pemilihan Umum;
- cc. 280 Komisi Pemilihan Umum;
- dd. 290 Badan Pengawas Pemilu;
- ee. 300 Keamanan/ Ketertiban;
- ff. 310 Pertahanan;
- gg. 320 Kemiliteran;
- hh. 330 Keamanan;
- ii. 340 Pertahanan Sipil;
- jj. 350 Kejahatan;



kk. 360	Bencana;
ll. 370	Kecelakaan;
mm. 380	–
nn. 390	–
oo. 400	Kesejahteraan Rakyat;
pp. 410	Jaring Pengaman Sosial;
qq. 420	Pendidikan;
rr. 430	Kebudayaan;
ss. 440	Kesehatan;
tt. 450	Agama;
uu. 460	Sosial;
vv. 470	Kependudukan;
ww. 480	Media Massa;
xx. 490	–
yy. 500	Perekonomian;
zz. 510	Perdagangan;
aaa. 520	Pertanian;
bbb. 530	Perindustrian;
ccc. 540	Pertambangan Kesamuderaan;
ddd. 550	Perhubungan;
eee. 560	Tenaga Kerja;
fff. 570	Permodalan;
ggg. 580	Perbankan/Moneter;
hhh. 590	Agraria;
iii. 600	Pekerjaan Umum Dan Ketenagaan;
jjj. 610	Pengairan;
kkk. 620	Jalan;
lll. 630	Jembatan;
mmm. 640	Bangunan;
nnn. 650	Tata Kota;
ooo. 660	Tata Lingkungan;
ppp. 670	Ketenagaan;
qqq. 680	Peralatan;
rrr. 690	Air Minum;
sss. 700	Pengawasan;
ttt. 710	Bidang Pemerintahan;
uuu. 720	Bidang Politik;
vvv. 730	Bidang Keamanan/Ketertiban;
www. 740	Bidang Kesejahteraan Rakyat;
xxx. 750	Bidang Perekonomian;
yyy. 760	Bidang Pekerjaan Umum;
zzz. 770	–
aaaa. 780	Bidang Kepegawaian;
bbbb. 790	Bidang Keuangan;
cccc. 800	Kepegawaian;
dddd. 810	Pengadaan;
eeee. 820	Pengangkatan dan Mutasi;
ffff. 830	Kedudukan;
gggg. 840	Kesejahteraan;



hhhh. 850 Cuti;
 iii. 860 Penilaian;
 jjjj. 870 Tata Usaha;
 kkkk. 880 Pemberhentian Pegawai;
 llll. 890 Pendidikan;
 mmmm. 900 Keuangan;
 nnnn. 910 Anggaran;
 oooo. 920 Otorisasi;
 pppp. 930 Verifikasi;
 qqqq. 940 Pembukuan;
 rrrr. 950 Perbendaharaan;
 ssss. 960 Pembinaan Kebendaharaan;
 tttt. 970 Pendapatan;
 uuuu. 980 –
 vvvv. 990 Bendaharawan;

3. Perincian Ketiga :

KODE	KLASIFIKASI
000	UMUM
001	Lambang
001.1	Garuda
001.2	Bendera Kebangsaan
001.3	Daerah
001.31	Daerah Provinsi
001.32	Daerah Kabupaten / Kota)
001.4	Bandir / Umbul-Umbul
002	Tanda Kehormatan / Penghargaan (Khusus untuk Non PNS)
002.1	Bintang
002.2	Satyalencana
002.3	Satyakarya Nugraha
002.4	Monumen
002.5	Penghargaan secara adat
002.6	Penghargaan lainnya (Kalpataru, Upakarti, Adipura, dsb)
003	Hari Raya / Besar
003.1	Nasional (17 Agustus, Hari Pahlawan , Hari Anak, HKSN,dsb)
003.2	Keagamaan
003.3	Hari Ulang Tahun/HUT(Hari Jadi Provinsi/ Kabupaten/ Kota)
003.4	Hari-hari Besar Internasional
004	Ucapan
004.1	Terima Kasih
004.2	Selamat
004.3	Mohon Diri
004.4	Bela Sungkawa
004.5	Ucapan Lainnya
005	Undangan
006	Tanda Jabatan
006.1	Pamong Praja
006.2	Tanda Pengenal
006.3	Jabatan Lainnya
007	-
008	-
009	-



010	URUSAN DALAM
011	Gedung Kantor/ termasuk instalasi/ Prasaran Fisik Pamong Praja/ Kantor Dinas
011.1	Listrik
011.2	Telepon
011.3	Otomasi
011.4	Air Minum
011.5	Hidrant
011.6	Alarm
011.7	Internet
012	Rumah Dinas/ Tanah Rumah Dinas/ Parabot Rumah Dinas
013	Akomodasi / Persinggahan (Mess / Wisma/ hotel)
014	Rumah Susun Apartemen
015	Peminjaman sarana Prasarana Kantor (ruangan, gedung, kendaraan, LCD, Laptop dll)
016	Pengurusan Kendaraan Dinas
017	Keamanan / Ketertiban Kantor
018	Kebersihan Kantor
019	Protokol
019.1	Upacara Bendera
019.2	Tata tempat
019.21	Pemasangan gambar Presiden/ Wakil Presiden
019.3	Audiensi
019.4	Penerimaan Tamu
019.5	Kerjasama
020	PERALATAN
020.1	Pengadaan termasuk pengumuman pengadaan, penunjuk lelang.
020.2	Proses pengadaan
020.21	Prakualifikasi : rapat persiapan, HPS, penjelasan pekerjaan/ anwijzing, negoisasi, evaluasi
020.22	SPK, Kontrak / Amandemen / Addendum, Teguran
020.23	Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
020.24	Serah Terima Pekerjaan
020.25	Pemeriksaan Pekerjaan
020.26	Perpanjangan Waktu / Ferce majore
020.27	Denda
020.28	Sanggahan
020..29	Pemeliharaan Barang / Jasa
021	Pengadaan Alat Tulis
022	Pengadaan Peralatan & Mesin Kantor
023	Pengadaan Perabot Kantor
024	Pengadaan Mobil dinas/ Alat angkutan
025	Pakaian Dinas
026	Pengadaan Senjata
027	Pengadaan Tanah
028	Pengadaan komputer
029	Inventaris
029.1	Pendataan Barang Inventaris
029.2	Laporan Barang Inventaris.
029.3	Pendapatan Barang Milik Negara
029.4	Pemeliharaan Barang Milik Negara
029.5	Penghapusan Barang Milik Negara
030	KEKAYAAN DAERAH
030.1	Penilaian asset
030.2	Peyajian neraca daerah
031	Sumber Daya Alam



032	Asset Bergerak
032.1	Mobil Dinas Jabatan
032.2	Mobil Dinas Operasional
032.3	Kendaraan Dinas Roda 2
032.4	Lainnya
033	Asset Tidak Bergerak
033.1	Tanah
033.2	Bangunan
033.3	Lainya
034	Tanaman
035	Hewan
036	Saham/ Obligasi
037	Alat Pengangkut (Darat, Laut, Udara)
038	Peralatan Pabrik/ Laboratorium/ Alat-Alat Berat
039	Peralatan Kesehatan/ Medis (Rumah Sakit, Balai Pengobatan)
040	PERPUSTAKAAN / KEARSIPAN / SANDI
041	Perpustakaan
041.1	Pameran Bahan Perpustakaan
041.2	Pengolahan (Katalog, Bibliografi)
041.3	Sirkulasi / layanan
041.31	Keanggotaan
041.32	Peminjaman dan Pengembalian
041.4	Deposit
041.5	Pemeliharaan, Pelestarian / alih media
041.6	Pembinaan Perpustakaan
041.61	Bantuan Buku, Rak
041.7	Penghapusan/ Penyusunan Bahan Perpustakaan
041.8	Jenis-Jenis Perpustakaan (Umum, Khusus, PT, Sekolah, Keliling, Taman Bacaan Masyarakat)
041.9	Kemitraan, Forum Perpustakaan, Kerjasama antar Perpustakaan
042	Pengadaan Bahan Pustaka
043	Hunting Bahan Pustaka
044	Dokumentasi
045	Kearsipan
045.1	Perauran Perundangan Kearsipan
045.11	Tata Naskah
045.12	Klasifikasi Arsip
045.13	Jadwal Retensi Arsip
045.14	Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip
045.15	Per Undang-undangan yang lain
045.2	Penataan Arsip
045.21	Pemberkasan
045.22	Arsip Aktif
045.23	Arsip Inaktif
045.24	Arsip Vital
045.25	Arsip Statis
045.3	Akuisisi Arsip
045.31	Penyusutan Arsip
045.32	Penilaian Arsip
045.33	Pemindahan Arsip
045.34	Penyerahan Arsip
045.35	Pemusnahan Arsip
045.4	Pembinaan Kearsipan
045.41	Sosialisasi
045.42	Wookshop
045.43	Monotoring/ evaluasi Kearsipan



045.44	Bimbingan Kearsipan
045.45	Gerakan Sadar Tertib Arsip
045.5	Pengawasan
045.6	Pemeliharaan, Pelestarian / Konservasi Arsip
045.61	Fumigasi dan Termit Control
045.62	Laminasi
045.63	Alih Media
045.7	Layanan Pemasyarakatan
045.71	Pameran
045.72	Pengembangan Sistem Kearsipan
045.73	Sistem Jaringan Informasi kearsipan
048	Dokumentasi
049	Sandi
049.1	Telegram, Telex, Radio, ISB
049.2	Data Elektronik
050	PERENCANAAN DAN EVALUASI
	Meliputi RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional), RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), Musrembang, Musrembangpus, antar Kementerian, Musrembangnas, Musrembangdes
050.1	RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional)
050.11	RENSTRA (Rencana Strategi)
050.12	RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah)
050.13	RENSTRA BAPPEDA
050.2	Program Nasional
050.21	RKP (Rencana Kerja Pembangunan)
050.22	RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran kementerian Lembaga)
050.23	RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)
050.24	Rencana Kerja SKPD
050.25	KUA (Kebijakan Umum Anggaran), KUPA (Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan PPAS (Penetapan Plafon Anggaran
050.26	Jawaban Atas Pandangan fraksi
050.27	Nota Keuangan
050.28	RKT (Rencana kerja Tahunan)
050.29	RKO (Rencana Kerja Operasional)
050.30	-
050.3	Proyek Bidang Peralatan
050.4	Perpustakaan/ Kearsipan/ sandi
050.5	-
050.6	Organisasi/ ketatalaksanaan
050.61	Struktur
050.62	Pembagian fungsi dan tugas
050.7	penelitian
050.8	Survey
050.9	Laporan
050.91	Laporan Berkala
050.92	LAKIP / SAKIP (Laporan / Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
050.93	Evaluasi
050.94	Evaluasi Rencana Strategis
050.95	Evaluasi Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah
050.96	Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah
050.97	Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Jangka menengah Kabupaten/ Kota
050.98	Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota



051	Bidang Pemerintah
052	Bidang Politik
053	Bidang Keamanan dan Ketertiban
054	Bidang Kesejahteraan Rakyat
055	Bidang Perekonomian
056	Bidang Pekerjaan Umum
057	Bidang Pengawas
058	Bidang Kepegawaian
059	Bidang Keuangan
060	ORGANISASI KETATALAKSANAAN
060.1	Program Kerja
061	Organisasi Instansi Pemerintahan (struktur organisasi)
061.1	Susunan Organisasi dan Tata Kerja
061.2	Tata tertib Kantor, Termasuk Pengaturan hari dan jam kerja pegawai
061.3	Uraian Tugas
061.4	Ketentuan Pakaian Seragam Dinas dan Atribut
062	Organisasi Badan Non Pemerintah
063	Organisasi Badan Pemerintah
064	Organisasi Semi Pemerintah
065	Ketatalaksanaan / Sistem
065.1	Pelimpahan wewenangan / Penunjukan Plt, Plh
065.2	Stempel Dinas dan Stempel jabatan
065.3	Papan nama instansi pemerintah / non pemerintah
065.4	Alamat-alamat Kantor dan Pejabat
066	Tata Hubungan Kerja / Penegakan Disiplin Aparatur
067	Standart Operasional Prosedur
067.1	Standar Pelayanan
067.2	Kopentensi Pelayanan
067.3	Pembinaan Pelayanan
068	Kopentensi Jabatan
069	Analisis Jabatan
069.1	Pengukuran / Penilaian beban kerja Jabatan Struktural dan Fungsional
069.2	Uraian Jabatan
069.3	Evaluasi dan Laporan Ketatalaksanaan
070	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
070.1	Perizinan penelitian
071	Riset meliputi Riset Design, Pembahasan sampai dengan laporan akhir riset
072	Pengembangan
072.1	Krenova (Kreatifitas dan Inovasi Masyarakat)
072.2	SINAS (Sistem Inovasi Nasional)
072.3	SIDA (Sistem Inovasi Daerah) Meliputi Cluster, Kabupaten, desa Inovatif
072.4	Inkubator Tehnologi dan Bisnis
072.5	Pameran Produk Inovasi / Ristek
072.6	BTC (Bisnis Tehnologi Center)
072.7	Raptek (Penerapan Iptek)
072.8	HKI (Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual)
073	Kajian
073.1	Kajian Strategis / diskusi / Forum Group Discussion (FGD)
073.2	Seminar
073.3	Workshop
073.4	Rapat Koordinasi / Rapat Teknis
073.5	Lokakarya
073.6	Diseminasi / Sosialisasi hasil Penelitian

074	Kerjasama Penelitian
074.1	Instansi Pemerintah Pusat / Daerah
074.2	Perguruan Tinggi Negeri / Swasta
074.3	Lembaga swasta Nasional, Lembaga Swadaya Masyarakat
074.4	Lembaga Internasional
075	Perekayasaan
076	Jarlit bang (Jaringan Penelitian dan Pengembangan)
077	Publikasi Ilmiah
077.1	Jurnal Ilmiah
080	KONFERENSI / RAPAT KOORDINASI
081	Gubernur
082	Bupati / Walikota / DPR
083	Komponen Eselon lainnya (termasuk Pimpinan SKPD)
084	Instansi Lainnya (diluar Kemendagri)
085	Internasional di dalam Negeri
086	Internasional di luar Negeri
087	Study Komparatif
088	Rapat Koordinas (Rakor)
088.1	Rakor Tingkat Provinsi
088.2	Rakor Tingkat Kab. / Kota
088.3	Rakor Tingkat Kecamatan/ Kelurahan / Desa
089	Musrimbang
090	PERJALANAN DINAS
091	Perjalanan Presiden / Wakil Presiden Ke Daerah
092	Perjalanan Menteri ke Daerah
093	Perjalanan Pejabat Tinggi (Pejabat Eselon I)
094	Perjalanan Dinas Kepala Daerah Provinsi
095	Perjalanan Dinas Kepala Daerah Kabupaten / Kota
096	Perjalanan Dinas Ketua/ Anggota Dewan
097	Perjalanan Dinas Pejabat Daerah dalam Daerah meliputi Surat Perintah Tugas (SPT)
097.1	Perjalanan Dinas Sekda
097.2	Perjalanan Dinas Kepala SKPD
097.3	Perjalanan Dinas Eselon III dan IV
097.4	Perjananan Dinas staf/pelaksana
098	Perjalanan Pejabat Tinggi Ke Luar Negeri
099	Perjalanan Pegawai ke Luar negeri
100	PEMERINTAHAN Meliputi : Tata Praja, Legislatif, Eksekutif, Yudikatif, Hubungan Luar Negeri
101	GDN (Gerakan Disiplin Nasional)
102	Good Governance
103	Laporan Harta Kekayaan Pejabat
110	PEMERINTAHAN PUSAT
111	Presiden Meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Sumpah dan Serah Terima Jabatan
111.1	Penanggung Jawaban Presiden Kepada MPR
111.2	Amanat Presiden / Amanat Kenegaraan
112	Wakil Presiden Meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Sumpah dan Serah Terima Jabatan
112.1	Pertanggungjawaban Presiden kepada MPR
112.2	Amanat Presiden/ Amanat kenegaraan
113	Susunan Kabinet
113.1	Reshufle



113.2	Penunjukan Menteri ad Intren
113.3	Sidang Kabinet, Sidang Stabilitas Ekonomi (lihat 500.)
114	Kementerian Dalam Negeri
114.1	Amanat Menteri Dalam Negeri
115	Kementrian Lainnya
116	Lembaga Tinggi Negara (DPA, MA, BPK)
117	Lembaga Non Kementerian
118	Otonomi Daerah
119	Kerjasama Antar Kementrian
120	PEMERINTAH PROVINSI
120.01	Kebijakan Pemerintah Provinsi
120.02	Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Gubernur (LKPJ)
120.03	Monografi, tambahan kode wilayah
120.1	Koordinasi
120.11	Satuan Kerja Perangkat Daerah
120.12	Instansi Vertikal
120.13	Kerjasama antar Provinsi / Daerah dan Luar Negeri
121	Gubernur meliputi pencalonan, Pengangkatan, pelantikan, Pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya.
122	Wakil Gubernur meliputi pencalonan, Pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya
123	Sekretaris Daerah meliputi pencalonan, Pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan
124	Badan-badan Pertimbangan Daerah,
124.1	Muspida Privinsi
124.2	Forum PAN (Panitia Anggaran Provinsi)
124.3	Forum Koordinasi Lainnya
125	Pembentukan / Pemekaran Wilayah
125.1	Pembentukan Daerah Otonom
125.2	Pembentukan wilayah
125.3	Perubahan Batas Wilayah
125.4	Pemekaran Wilayah/ Pembentukan Daerah Baru
125.5	Permasalahan Batas wilayah
125.6	Pemindahan Ibu Kota Provinsi
125.7	Pemberian dan Penggantian Nama Kota, Daerah, Sungai, Pulau, Selat, Jalan dan sebagainya
126	Pembagian Wilayah
127	Penyerahan Urusan
128	Swapraja / Penataan Wilayah / Daerah
130	PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA
130.01	Kebijakan Pemerintah Kabupaten / Kota
130.02	Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Bupati / walikota (LKPJ)
130.03	Monografi
130.1	Koodinasi
130.11	Satuan kerja Perangkat Daerah
130.12	Instansi Vertikal
130.13	Kerjasama Antar Provinsi / Daerah, dan Luar negeri (Sister city)
131	Bupati / Walikota meliputi Pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya
132	Wakil Bupati / Walikota meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya



133	Sekretaris Daerah meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya
134	Forum Koordinasi Pemerintah Di Daerah, meliputi Muspida
134.1	Muspida Kota
134.2	Forum PAN (Panitia Anggaran Kota)
134.3	Forum Koordinasi lainnya.
134.4	Kerja sama antar Kab / kota
135	Pembentukan / Pemekaran Wilayah
135.1	Pembentukan Daerah Otonom / wilayah
135.2	Perubahan Batas wilayah
135.3	Pemekaran Wilayah
135.4	Permasalahan Batas wilayah
135.5	Pembentukan Ibu Kota / Kotamadya
135.6	Pemindahan Ibukota Kabupaten / Kota
135.7	Pemberian dan Penggantian nama Kota, Daerah, jalan
136	Pembagian wilayah
137	Penyerahan Urusan
138	Pemerintahan Wilayah Kecamatan
138.1	Sambutan/pengarahan/amanat
138.2	Pembentukan Kecamatan
138.3	Pemekaran Kecamatan
138.4	Perluasan / Perubahan batas wilayah Kecamatan
138.5	Pemindahan Ibu Kota Kecamatan
138.6	Tapal batas kecamatan
139	Laporan Kecamatan
140	PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN
141	Pamong Desa meliputi pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pelantikan, serah terima, penghasilan dsb
142	Penghasilan Pamong Desa / Kelurahan (APBDes / Kel)
143	Kekayaan Desa : bondo desa, tanah bengkok dll
144	Lembaga Tingkat Desa : Rembug desa, Badan Permusyawaratan desa, LKMD
145	Administrasi Desa/ Kelurahan : Monografi, Peta Rupa Bumi dll
146	Kewilyahan
146.1	Pembentukan Kelurahan/Desa
146.2	Pemekaran Kelurahan/Desa
146.3	Perubahan batas wilayah/perluasan Kelurahan/Desa
146.4	Perubahan nama Kelurahan/Desa
146.5	Permasalahan Batas Desa / Kelurahan
146.6	Penyatuan Desa / Kelurahan
146.7	Penghapusan Desa / Kelurahan
146.8	Kerja sama antar Kelurahan / antar Desa
147	Lembaga-lembaga Tingkat Pemerintahan Desa/ Kelurahan (lihat 410 rinciannya)
148	Perangkat Desa / Keluraha
148.1	Kepala Desa (Kades)/ Kepala Kelurahan (Lurah)
148.2	Sekretaris Desa (Sekdes)/ Sekretaris Kelurahan (Seklur)
148.3	Kaur Desa/ Kelurahan
148.4	Kasi Desa/ Kelurahan
148.5	Staf Desa/ Kelurahan
149	Dewan Pemerintahan Desa / Kelurahan
149.1	Rukun Tetangga
149.2	Rukun Warga
149.3	Rukun Kampung
149.4	Pembentukan Rt/Rw



150	LEGISLATIF MPR / DPR / DPD
151	Keanggotaan MPR
151.1	Pencalonan
151.2	Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah
151.3	Pemberhentian
151.31	Recall
151.32	Meninggal
151.4	Pelanggaran
151.5	Pergantian antar Waktu
152	Keanggotaan DPR
152.1	Pencalonan
152.2	Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah
152.3	Pemberhentian
152.31	Recall
152.32	Meninggal
152.4	Pelanggaran
152.5	Pergantian Antar waktu
153	Keanggotaan DPD
153.1	Pencalonan
153.2	Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah
154	Persidangan
154.1	Sidang Pleno
154.2	Dengar Pendapat/ Hearing
154.3	Rapat Komisi
154.4	Reses
154.5	Paripurna
155	Kesejahteraan
155.1	Keuangan
155.2	Penghargaan
155.3	Tunjangan lain-lain
156	Hak
157	Jabatan Pemerintah
158	Peninjauan / Kunjungan Lapangan
159	Kunjungan Kerja / Study Banding / Konsultasi
160	DPRD PROVINSI
161	Keanggotaan
161.1	Pencalonan
161.2	Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah
161.3	Pelanggaran
161.4	Pemberhentian Antar Waktu
161.41	Meninggal Dunia
161.42	Mengundurkan Diri
161.43	Diberhentikan
161.5	Alat Kelengkapan Dewan
161.51	Pimpinan
161.52	Badan Musyawarah
161.53	Komisi
161.54	Badan Legislasi Daerah
161.55	Badan Anggaran
161.56	Badan Kehormatan
161.57	Alat Kelengkapan lain (pansus)
162	Persidangan
162.1	Rapat-rapat
162.11	Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Istimewa
162.12	Rapat Pimpinan DPRD
162.13	Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran, Rapat Badan



	<i>Legislasi, Rapat Badan Kehormatan, Rapat Pansus</i>
162.14	<i>Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Konsultasi</i>
162.15	<i>Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, Rapat Pemandangan Umum</i>
162.16	<i>Rapat Fraksi</i>
162.2	<i>Fraksi</i>
162.3	<i>Tata Tertip</i>
162.4	<i>Kode Etik</i>
162.5	<i>Reses</i>
162.6	<i>Peninjauan / Kunjungan Lapangan</i>
162.7	<i>Kunjungan Kerja / Study Banding / Konsultasi</i>
163	<i>Kesejahteraan</i>
163.1	<i>Keuangan</i>
163.2	<i>Penghargaan</i>
164	<i>Hak</i>
165	<i>Sekretariat DPR Provinsi</i>
170	<i>DPRD KABUPATEN / KOTA</i>
171	<i>Keanggotaan</i>
171.1	<i>Pencalonan</i>
171.2	<i>Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah</i>
171.3	<i>Pelanggaran</i>
171.4	<i>Pemberhentian Antar Waktu</i>
171.41	<i>Meninggal Dunia</i>
171.42	<i>Mengundurkan Diri</i>
171.43	<i>Diberhentikan</i>
171.5	<i>Alat Kelengkapan Dewan</i>
171.51	<i>Pimpinan</i>
171.52	<i>Badan Musyawarah</i>
171.53	<i>Komisi</i>
171.54	<i>Badan Legislasi Daerah</i>
171.55	<i>Badan Anggaran</i>
171.56	<i>Badan kehormatan</i>
171.57	<i>Alat Kelengkapan Lain (Pansus)</i>
172	<i>Persidangan</i>
172.1	<i>Rapat-Rapat</i>
172.11	<i>Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Istimewa</i>
172.12	<i>Rapat Pimpinan DPRD</i>
172.13	<i>Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran, Rapat Badan Legislasi, Rapat Badan Kehormatan, Rapat Pansus</i>
172.14	<i>Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Konsultasi</i>
172.15	<i>Rapat kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, Rapat Pemandangan Umum</i>
172.16	<i>Rapat Fraksi</i>
172.2	<i>Fraksi</i>
172.3	<i>Tata Tertib</i>
172.4	<i>Kode Etik</i>
172.5	<i>Reses</i>
172.6	<i>Peninjauan / Kunjungan Lapangan</i>
172.7	<i>Kunjungan Kerja / Study Banding / Konsultasi</i>
173	<i>Kesejahteraan</i>
173.1	<i>Keuangan</i>
173.2	<i>Penghargaan</i>
174	<i>Hak</i>
180	<i>HUKUM</i>
180.1	<i>Konstitusi</i>
180.11	<i>Dasar Hukum</i>



180.12	Undang-Undang Dasar
180.13	Undang-Undang
180.14	Peraturan Pemerintah
180.15	Keppres / Perpres / Inpres
180.16	Kepmen / Permen / Inmen
180.17	Perundangan tingkat Provinsi meliputi Perda, Kepgub / Pergub / Ingub
180.18	Perundangan Tingkat Kabupaten/Kota meliputi Perda, KepBup/ KepWal, PerBup/ PerWal
180.19	Perundangan Tingkat Desa meliputi Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa
180.2	Tap MPR
180.3	Konvensi
181	Perdata
181.1	Tanah
181.2	Rumah
181.3	Utang/ Piutang
181.31	Gadai
181.32	Hipotik
181.4	Notariat
182	Pidana
182.1	Tindak Pidana Umum
182.2	Tindak Pidana Khusus
183	Peradilan
183.1	Jenis-jenis Peradilan
183.11	Peradilan Umum
183.111	Peradilan Negeri Tingkat Pertama
183.112	Peradilan Tinggi
183.113	Mahkamah Agung
183.12	Peradilan Agama Islam
183.121	Pengadilan Agama Islam Tingkat Pertama
183.122	Pengadilan Tinggi Agama Islam
183.123	Mahkamah Islam Agung
183.13	Peradilan Militer
183.1.31	Mahkamah Militer Tingkat Pertama
183.132	Mahkamah Militer Tinggi
183.133	Mahkamah Militer Agung
183.14	Peradilan Tata Usaha Negara
183.141	Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama
183.14	Peradilan Tata Usaha Negara
183.141	Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama
183.142	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
183.143	Mahkamah Tata Usaha Negara Agung
183.15	Peradilan Tindak Pidana Korupsi
183.16	Peradilan Hak Asasi Manusia
183.17	Mahkamah Konstitusi
183.18	Komisi Yudisial
183.19	Ombustmen
183.2	Upaya Hukum
183.21	Banding
183.22	Kasasi
183.23	Derden Verset
183.24	Peninjauan Kembali
183.25	Grasi, Amnesti, Abolisi
183.3	Eksekusi
183.4	Pembinaan hukum, meliputi kadarkum
183.5	Bantuan Hukum, meliputi LBH



184	<i>Hukum Internasional</i>
185	<i>Imigrasi</i>
185.1	<i>Visa</i>
185.2	<i>Paspor</i>
185.3	<i>Exit</i>
185.4	<i>Reentry</i>
185.5	<i>Lintas Batas/Batas Antar Negara</i>
186	<i>Kepenjaraan</i>
186.1	<i>Registrasi narapidana</i>
186.2	<i>Pembinaan narapidana</i>
186.3	<i>Pembebasan narapidana</i>
186.4	<i>Tahanan titipan</i>
187	<i>Kejaksaan</i>
187.1	<i>Penuntutan Umum</i>
187.2	<i>Penuntutan Khusus</i>
188	<i>Peraturan Perundang-Undangan</i>
188.1	<i>Tap MPR</i>
188.2	<i>Undang-Undang</i>
188.3	<i>Peraturan</i>
188.3.1	<i>Peraturan Pemerintah</i>
188.3.2	<i>Peraturan Menteri</i>
188.3.3	<i>Peraturan Lembaga Non Deprtemen</i>
188.3.4	<i>Peraturan Daerah</i>
188.3.41	<i>Peraturan Daerah Provinsi</i>
188.3.42	<i>Peraturan Daerah Kabupaten/ kota</i>
188.4	<i>Keputusan</i>
188.41	<i>Presiden</i>
188.42	<i>Menteri</i>
188.43	<i>Lembaga Non Departemen</i>
188.44	<i>Gubernur</i>
188.45	<i>Bupati/ Walikota</i>
188.46	<i>Sekda/ Kepala Dinas/ Inpektur</i>
188.5	<i>Instruksi</i>
188.51	<i>.1 Presiden</i>
188.5.2	<i>.2 Menteri</i>
188.5.3	<i>.3 Lembaga Non Departemen</i>
188.5.4	<i>.4 Gubernur</i>
188.5.5	<i>.5 Bupati/ Walikota</i>
189	<i>Hukum Adat</i>
189.1	<i>Tokoh Adat/ Masyarakat</i>
198.2	<i>Bentuk hukum</i>
199	
190	<i>HUBUNGAN LUAR NEGERI</i>
191	<i>Perwakilan Asing/ Kedutaan/ Konjen</i>
192	<i>Tamu Negara</i>
193	<i>Kerjasama Dengan Negara Asing</i>
193.1	<i>Asean</i>
193.2	<i>Bantuan Luar Negeri</i>
194	<i>Perwakilan Ri Di Luar Negeri</i>
195	<i>PBB</i>
196	<i>Laporan Luar Negeri</i>
200	<i>POLITIK</i>
201	<i>Perencanaan dan Progra Pembinaan Politik Luar Negeri</i>
201.1	<i>Pembinaan dan Pemahaman ideologi Negara</i>
201.2	<i>Kesatuan Bangsa</i>
201.3	<i>Pelaksanaan Pembinaan Politikdaam Negeri, Laporan</i>



201.4	<i>Keadan Politik Luar Negeri</i>
201.5	<i>Evaluasi dan Pengawasan Pembinaan Ipoeksosbud Hankam</i>
201.6	<i>Orde Baru</i>
201.7	<i>Orde reformasi</i>
204	<i>Verifikasi Parpol Peserta Pemilu</i>
204.1	<i>Penyelenggaraan Pemilu</i>
204.2	<i>Pendaftaran Pemilih</i>
205	<i>Penetapan Daftar Calon Pemilih Tetap</i>
206	<i>Parpol Peserta Pemilih</i>
207	<i>Pendaftaran Bakal Caleg</i>
208	<i>Penetapan Caleg</i>
209	<i>Peraturan / Tata Cara Kampanye</i>
210	<i>KEPARTAIAN</i>
211	<i>Partai Politik</i>
211.1	<i>Lambang Parpol</i>
211.2	<i>Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parpol</i>
211.3	<i>Program Kerja, Data Kerja Parpol</i>
211.4	<i>Pembinaan Parpol</i>
211.5	<i>Hasil Munas / Musda Parpol</i>
211.6	<i>Struktur/ Kepengurusan, Pengkaderan dan Keanggotaan Parpol</i>
211.7	<i>Data Inventaris dan Keuangan Parpol</i>
212	<i>Partai/ Organisasi Terlarang</i>
212.1	<i>Keputusan Pembubaran partai/ organisasi terlarang</i>
212.2	<i>Daftar dan data pengurus anggota partai / organisasi terlarang</i>
212.3	<i>Ijin Meninggalkan tempat / domisili bagi anggota partai / organisasi terlarang</i>
212.4	<i>Daftar berkala mengenai Keadaan anggota partai/ organisasi terlarang</i>
212.5	<i>Laporan umum mengenai keadaan anggota partai/ organisasi terlarang</i>
213	<i>Bantuan Keuangan Parpol</i>
220	<i>ORGANISASI KEMASYARAKATAN</i>
221	<i>Pembentukan organisasi</i>
221.1	<i>Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga</i>
221.2	<i>Kepengurusan dan daftar anggota organisasi</i>
221.3	<i>Program Kerja Organisasi</i>
221.4	<i>Munas/ Musda Provinsi dan Kabupaten / Kota</i>
222	<i>Pembinaan organisasi</i>
222.1	<i>Kegiatan organisasi dan pelaporannya</i>
222.2	<i>Daftar inventaris kekayaan organisasi</i>
223	<i>Berdasarkan Perjuangan</i>
224	<i>Berdasarkan Kekayaan</i>
225	<i>Berdasarkan Kerohanian</i>
226	
230	<i>ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL</i>
230	<i>Pembentukan organisasi</i>
230.1	<i>Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga</i>
230.2	<i>Kepengurusan dan daftar anggota organisasi</i>
230.3	<i>Program kerja organisasi</i>
230.4	<i>Munas / Musda Provinsi dan Kabupaten / Kota</i>
231	<i>Pembinaan Organisasi</i>
231.1	<i>Kegiatan organisasi dan pelaporannya</i>
231.2	<i>Daftar inventaris kekayaan organisasi</i>
232	<i>Ikatan Dokter Indonesia</i>
233	<i>Persatuan Guru Republik Indonesia</i>
234	<i>Persatuan Sarjana Hukum Indonesia</i>



235	<i>Persatuan Advokat Indonesia</i>
236	<i>Lembaga Bantuan Hukum Indonesia</i>
237	<i>Korp Pegawai Republik Indonesia</i>
238	<i>Persatuan Wartawan Indonesia</i>
239	<i>Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (Icmi)</i>
240	ORGANISASI PEMUDA
240.1	<i>Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga</i>
240.2	<i>Kepengurusan dan daftar anggota organisasi</i>
240.3	<i>Program kerja organisasi</i>
240.4	<i>Munas / Musda Provinsi dan Kabupaten / Kota</i>
241	<i>Pembinaan Organisasi</i>
241.1	<i>Kegiatan organisasi dan pelaporannya</i>
241.2	<i>Daftar Inventaris kekayaan organisasi</i>
242	<i>Komite Nasional Pemuda Indonesia</i>
243	<i>Organisasi Mahasiswa</i>
244	<i>Organisasi Pelajar</i>
245	<i>Gerakan Pemuda Ansor</i>
246	<i>Gerakan Pemuda Islam Indonesia</i>
247	<i>Gerakan Pemuda Marhaenis</i>
248	<i>Pemuda Pancasila</i>
249	<i>Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia</i>
250	ORGANISASI BURUH, TANI DAN NELAYAN
251	<i>Pembentukan organisasi</i>
251.1	<i>Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga</i>
251.2	<i>Kepengurusan dan daftar anggota organisasi</i>
251.3	<i>Program kerja organisasi</i>
251.4	<i>Munas / Musda Provinsi dan Kabupaten / Kota</i>
252	<i>Pembinaan Organisasi</i>
252.1	<i>Kegiatan organisasi dan pelaporannya</i>
252.2	<i>Daftar Inventaris kekayaan organisasi</i>
260	ORGANISASI WANITA
	<i>Pembentukan organisasi</i>
260.1	<i>Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga</i>
260.2	<i>Kepengurusan dan daftar anggota organisasi</i>
260.3	<i>Program kerja organisasi</i>
260.4	<i>Munas / Musda Provinsi dan Kabupaten / Kota</i>
261	<i>Pembinaan Organisasi</i>
261.1	<i>Kegiatan organisasi dan pelaporannya</i>
261.2	<i>Daftar Inventaris kekayaan organisasi</i>
262	<i>Federasi Buruh Seluruh Indonesia</i>
263	<i>Organisasi Buruh Internasional</i>
264	<i>Himpunan Kerukunan Tani Indonesia</i>
265	<i>Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia</i>
266	<i>Keluarga Supir Profesional Indonesia (Kesspi)</i>
267	<i>Kesatuan Pelaut Indonesia (Kpi)</i>
268	<i>Himpunan Pengusaha Pengerah Tenaga Kerja Indonesia</i>
269	<i>Perhimpunan Anggrek Indonesia</i>
270	PEMILU (PEMILIHAN UMUM) / PILKADA (PEMILIHAN DAERAH)
271	<i>Pendaftaran</i>
272	<i>Penelitian dan Penetapan Peserta Pemilu</i>
273	<i>Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilu</i>
274	<i>Pencalonan</i>
274.1	<i>Pengajuan Calon</i>
274.2	<i>Penelitian Calon</i>
274.3	<i>Penyusunan DCS (Daftar Calon Sementara)</i>
274.4	<i>Penyusunan DPT (Daftar Pemilih Tetap)</i>



274.5	<i>Pengumuman Daftar Calon</i>
274.6	<i>Nomor Urut / Tanda Gambar</i>
275	<i>Kampanye</i>
275.1	<i>Minggu Tenang</i>
275.2	<i>Dana Kampanye</i>
276	<i>Pemungutan Suara / Penghitungan Suara</i>
277	<i>Pemilih / Daftar Pemilih</i>
278	<i>Hasil Pemilu</i>
278.1	<i>Penetapan terpilih dan pembagian kursi anggota legislatif</i>
278.2	<i>Penetapan pemenang pilkada</i>
279	<i>Pengucapan Supah Janji</i>
280	<i>SARANA PEMILU</i>
280.1	<i>TPS</i>
280.2	<i>Kendaraan</i>
280.3	<i>Surat Suara</i>
280.4	<i>Kotak Suara</i>
280.5	<i>Bilik Suara</i>
281	<i>Petugas Pemilu</i>
282	<i>KPU / KPUD</i>
283	<i>Badan Pengawasan Pemilu / Pilkada</i>
284	<i>Panitia Pengawas Pemilu / Pilkada</i>
285	<i>Panitia Pemungut Kecamatan / PPK</i>
286	<i>Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara / KPPS</i>
287	<i>Pemantauan</i>
288	<i>Pelanggaran</i>
289	<i>Sengketa</i>
300	<i>KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM</i>
300.1	<i>Kebijakan Pemerintah mengenai situasi dan kondisi keamanan</i>
300.2	<i>Pembinaan dan pengaturan mengenai larangan</i>
300.3	<i>Pencegahan dan penanggulangan gangguan / ancaman keamanan/ ketertiban umum</i>
300.4	<i>Program kerja serta tata cara penanggulangan keamanan</i>
301	<i>Koordinasi dan kerjasama keamanan dan ketertiban umum (Trantibum)</i>
302	<i>Pengawasan Trantibum</i>
303	<i>Penegakan pelaksanaan perda</i>
304	<i>Pembinaan / Penyuluhan Pelanggaran Perda</i>
305	<i>Patroli Wilayah</i>
306	<i>Laporan Kunjungan VIP, VVIP, tamu asing</i>
306.1	<i>Pengamanan</i>
306.2	<i>Pengawasan</i>
307	<i>Pemberitahuan keadaan bahaya dan jam malam meliputi pemberitahuan, ketentuan pelaksanaan dan pengawasan</i>
310	<i>PERTAHANAN</i>
311	<i>Darat</i>
312	<i>Laut</i>
313	<i>Udara</i>
314	<i>Ketahanan Bangsa</i>
315	<i>Ketahanan Ekonomi</i>
316	<i>Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan</i>
320	<i>KEMELITERAN/ TNI</i>
321	<i>Latihan Militer</i>
322	<i>Wajib militer</i>
323	<i>Operasi militer</i>
324	<i>Kekarya TNI</i>
325	<i>Kemanunggalan TNI dengan rakyat</i>



330	KEAMANAN
331	Kepolisian
331.1	Kriminal
331.2	Razia Sajam
331.3	Razia Pekat
331.4	Pidana Kaorupsi
332	Polisi Pamong Praja
332.1	Teguran
332.2	Razia kaki lima
332.3	Tindak pidana ringan
332.4	Kerjasama dengan intitusi keamanan lain
332.5	Penanganan Huru hara/ demonstrasi
332.6	Razia PSK
332.7	Razia Gepeng
332.8	Razia pekat
332.9	Projustisia
333	Pengawasan / swadaya
333.1	Kamra
333.2	Hansip
333.3	Poskamling
334	Teror/ gangguan Masyarakat
336	Perjudian
337	Surat-surat kaleng
338	Pengaduan Masyarakat
339	Himbauan/ Larangan
340	PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)
340.1	Kebijaksanaan Pemerintah mengenai pembentukan Linmas
341	Pembinaan dan Diklat
341.1	Pengangkatan/ Pemberhentian Anggota Linmas
341.2	Pendidikan/ Latihan Linmas
341.3	Latihan PAM swakarsa
341.4	Pendidikan/ Latihan MENWA
342	Pengerahan dan Pengendalian Linmas
343	Kesejahteraan bagi anggota Linmas
343.1	Pemberian tali asih bagi anggota Linmas
343.2	Bantuan modal usaha bagi anggota Linmas
343.3	Santunan Uang duka bagi anggota Linmas
343.4	Penghargaan bagi anggota Linmas
344	Data Linmas, MENWA, PAM Swakarsa
344.1	Linmas Lanjut Usia
345	Orientasi kesadaran Bela Negara
346	Kegiatan Pelaksanaan Linmas
347	-
350	KEJAHATAN
351	Makar/ Pemberontakan/ Terorisme
352	Pembunuhan
353	Penganiyaan/ Pencurian/ Perampasan
354	Subversi/ Penyeludupan/ Narkotika
355	Penipuan dan pemalsuan
355.1	Uang
355.2	Ijazah
355.3	Kejagatan Pemalsuan Lainnya
356	Korupsi/ Penyelewengan/ Penyalahgunaan Jabatan
357	Kekerasan pada perempuan dan anak
357.1	Pelaporan
357.2	Penanganan Korban



358	<i>Kenakalan</i>
359	<i>Kejahatan Lainnya (Traficking, hipnotis, dll)</i>
360	<i>BENCANA</i>
360.1	<i>Pelatihan</i>
360.2	<i>Surat Keputusan</i>
360.3	<i>Berita Acara</i>
361	<i>Gunung Merapi/ Gempa/ Tsunami</i>
362	<i>Banjir/ Tanah longsor</i>
363	<i>Angin Topan</i>
364	<i>Kebakaran</i>
364.1	<i>Pemadam Kebakaran</i>
365	<i>Kekeringan</i>
366	<i>Darurat</i>
367	<i>Posko Bencana</i>
368	<i>Koordinasi/ unsur pengarah Penanggulangan Bencana</i>
369	<i>MOU Pemerintah Pusat BNPB</i>
370	<i>KECELAKAAN</i>
371	<i>Latihan SAR</i>
372	<i>Latihan Keterampilan Penyelamatan di air dan menyelam</i>
373	<i>Latihan Managemen bagi Pejabat</i>
374	<i>Satkorlat dan Satlak PBP</i>
375	<i>Pelatihan Kemampuan pusdalop bagi aparat PBP</i>
376	<i>Latihan keterampilan pemadam kebakaran</i>
377	<i>Kecelakaan Darat, Laut, Udara, Sungai / Danau</i>
378	<i>Investigasi/ Penyelidikan kecelakaan</i>
379	<i>Asuransi kecelakaan</i>
380	<i>PENDAMPINGAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI</i>
381	<i>Perencanaan</i>
381.1	<i>Perencanaan Teknis</i>
381.2	<i>Rekomendasi</i>
382	<i>Bantuan Bencana</i>
383	<i>Penanggulangan Bencana dengan pihak lain</i>
384	<i>Sarana prasara rehabilitasi dan rekonstruksi</i>
385	<i>PUSDALOPS</i>
386	<i>Kunjungan lapangan</i>
387	<i>Relawan</i>
388	<i>Laporan bencana</i>
390	<i>KERJASAMA BPBD DENGAN INSTANSI LAIN</i>
391	<i>Instansi pemerintah pusat</i>
392	<i>Instansi pemerintah di daerah</i>
393	<i>Lembaga International</i>
394	<i>Lembaga non pemerintah nasional</i>
400	<i>KESEJAHTERAAN RAKYAT</i>
401	<i>Kebijakan dan program pemerintah untuk kesejahteraan rakyat</i>
402	<i>Keluarga Miskin</i>
403	<i>Bantuan BLT</i>
404	<i>PNPM</i>
410	<i>BANGUNAN DESA/ KELURAHAN</i>
411	<i>Pembinaan Usaha Gotong royong</i>
411.1	<i>Swadaya Gotong Royong / Swasta Masyarakat Desa</i>
411.11	<i>Penataan Gotong Royong</i>
411.12	<i>Pungutan Desa</i>
411.2	<i>Lembaga Sosial Desa (LSD)</i>
411.21	<i>Pembinaan Rt / Rw</i>
411.22	<i>Proyek Desa</i>
411.23	<i>Musyawarah/ Musyawarah Pembangunan Desa</i>



411.24	Perencanaan Partisipatif Pembangunan
411.3	Latihan kerja Masyarakat / Peningkatan Keterampilan
411.31	Kader Masyarakat
411.32	Kuliah Kerja Nyata (KKN)
411.33	Pusat Latihan
411.4	Pembinaan Kesejahteraan keluarga (PKK)
411.5	Penyuluhan Masyarakat Desa
411.6	Posyandu
411.7	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
412	Perekonomian Desa/ Pembinaan Usaha Ekonomi Desa
412.1	Produksi Unggulan Desa
412.11	Kewirausahaan
412.12	Usaha Informasi
412.13	Angkatan Kerja Desa
412.14	Pengolahan
412.15	Pemasaran
412.2	Pembiayaan Pembangunan Desa
412.21	Pengkreditan Desa/ Usaha Ekonomi Desa
412.22	Inventarisasi Data
412.23	Bantuan / Stimulasi
412.24	Petunjuk/ Pembinaan Pelaksanaan
412.25	Pelaksanaan dan Perkembangan Pembangunan
412.26	Pelaporan
412.27	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP)
412.3	Koperasi Desa
412.31	Badan Usaha Unit Desa (BUUD)
412.32	Koperasi Unit Desa (KUD)
412.4	Penataan Bantuan Pembangunan Desa / Bina Bantuan
412.41	Bantuan Desa
412.42	Jumlah RT/RW yang diberi bantuan
412.5	Alokasi Bantuan Pembangunan Desa
412.6	Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa
412.61	Bantuan Langsung
413	Sarana dan Prasarana Desa/ Pembinaan SDA dan Pemukiman Desa
413.1	Prasarana dan Sarana Desa
413.11	Pembinaan
413.12	Bimbingan Teknis
413.2	Pemukiman Kembali penduduk/ Bina Tata Pemukiman Pedesaan
413.21	lokasi
413.22	Diskusi
413.23	Pelaksanaan
413.3	Pemugaran perumahan dan lingkungan Desa / perumahan dan lingkungan Desa
413.31	Rumah Sehat
413.32	Proyek Perintis
413.33	Pelaksanaan
413.34	Pengembangan
413.35	Perbaikan kampung
413.4	Sumber Daya Desa
413.5	Peran Serta Desa
413.6	Teknologi Tepat Guna (TTG)
414	Pengembangan Desa
414.1	Tingkat Perkembangan Desa
414.11	Jumlah Desa
414.12	Pemekaran Desa



414.13	Pembentukan Desa Baru
414.14	Evaluasi
414.15	Profil Desa/ Kelurahan
414.2	Unit Desa Kerja Pembangunan
414.21	Penyusunan Program / Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan
414.22	Lokasi UDKP / Desa Terpilih / Desa Bermasalah
414.23	Pelaksanaan / Program Proyek Masuk Desa
414.24	Bimbingan Pembinaan
414.25	Evaluasi
414.26	Pendataan Potensi / Profil Desa
414.3	Tata Desa
414.31	Inventarisasi
414.32	Penyusunan Pola Tata Desa
414.33	Aplikasi Tata Desa
414.34	Pemetaan
414.35	Pedoman Pelaksanaan
414.36	Evaluasi
414.37	Penataan Kawasan Ruang
414.38	Kawasan Khusus
414.4	Perlombaan Desa
414.41	Pedoman
414.42	Penilaian
414.43	Kejuaraan
414.44	Piagam
414.5	Pengembangan Kawasan Terpadu
414.51	Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT)
414.52	Bantuan Peningkatan Prasarana Jalan Poros Desa (P2JPd)
414.53	Pendamping dan Sarana Pendamping Purna Waktu (SP2W)
414.54	Penanganan Kasus
415	Koordinasi
415.1	Sektor Khusus
415.	Rapat Koordinasi Horizontal (RKH)
415.3	Team Koordinasi Pusat (TKP)
415.4	Kerjasama
415.41	Luar Negeri
415.42	Perguruan Tinggi
415.43	Kementerian/ Lembaga Pemerintah
415.44	Lembaga lainnya
416	-
420	PENDIDIKAN
420.1	Kebijakan dan Program Pemerintah untuk pendidikan
420.2	Pendidikan karakter bangsa, wawasan kebangsaan, jiwa nasionalisme dsb
420.3	Pendidikan Kemasyarakatan
421	Sekolah (termasuk akreditasi)
421.1	Pra sekolah (PAUD, Playgroup)
421.2	Sekolah Dasar
421.3	Sekolah Menengah
421.4	Sekolah Kejuruan
421.5	Perguruan Tinggi (Sekolah Tinggi, Akademi, Universitas, dll)
421.6	Kegiatan Sekolah meliputi Dies Natalis, Lustrum
421.7	Kegiatan Pelajar diantaranya reuni, darmawisata, widyawisata lomba-lomba (LKS, olimpiade sains, olimpiade olah raga dan sains), Pelajar teladan, Pertukaran Pelajar
421.8	Sekolah Pendidikan Luar Biasa



421.9	Pendidikan Luar Sekolah/ Pemberantasan Buta Huruf
422	Administrasi Sekolah
422.1	Persyaratan masuk sekolah, testing, ujian, OSPEK
422.2	Tahun Pelajaran
422.3	Hari Libur
422.4	Uang Sekolah, diantaranya SPP, SPI
422.5	Bea Siswa dan Penghargaan siswa berprestasi
422.6	Ijazah, Sertifikat
422.7	Bantuan Pendidikan : Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bantuan Khusus Murid (BKM), Bantuan Siswa Miskin (BSM)
423	Metode Belajar
423.1	Kuliah
423.2	Ceramah, Simposium, Seminar
423.3	Diskusi
423.4	Kuliah Lapangan, KKN, Magang/ Praktek/ PKL
423.5	Kurikulum
423.6	Karya Tulis, Karya Ilmiah
423.7	Ujian
423.8	Silabus / kurikulum
424	Tenaga Pengajar (Guru, Dosen, guru/dosen teladan, guru/dosen berprestasi)
424.1	Guru Kontrak / Guru Bantu
424.2	Sertifikasi Guru
425	Sarana Pendidikan
425.1	Bangunan Pendidikan
425.11	Gedung Sekolah
425.12	Kampus
425.13	Pusat Kegiatan
425.14	Perpustakaan
425.15	Laboratorium
425.2	Buku
425.3	Perlengkapan Pendidikan
425.4	Sistem Informasi Pendidikan
425.5	Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan
426	KEOLAHRAGAAN
426.1	Pembinaan Keolahragaan
426.11	Olah raga Prestasi (PON, Sea Games, Kejurnas, Olympiade)
426.12	Olah raga Pendidikan (POPDA SD, Porseni dll)
426.13	Olah raga Rekreasi / Massal (Senam, sepeda santai, olahraga tradisional)
426.14	Iptek dan Industri Olah raga
426.2	Sarana Prasarana Keolahragaan
426.21	Gedung Olah Raga
426.22	Stadion
426.23	Lapangan
426.24	Kolam Renang
426.3	Kemitraan Olah Raga
426.4	KONI
427	Kepramukaan/ Kepanduan
427.1	Pekemahan
427.2	Pembinaan Pramuka
428	Kepemudaan
428.1	Pertukaran Pemuda
428.2	Paskibraka
428.3	Sarana Prasarana Kepemudaan, meliputi sarana kegiatan remaja : gelanggang remaja



428.4	<i>Kemitraan Pemuda</i>
428.5	<i>Karang Taruna</i>
429	-
430	KEBUDAYAAN
430.1	<i>Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kebudayaan</i>
430.2	<i>Pembinaan bidang kebudayaan</i>
431	<i>Kesenian</i>
431.1	<i>Cabang Kesenian (Seni Pewayangan, seni tari, seni musik, seni rupa, seni lukis dll)</i>
431.2	<i>Sarana Pengembangan Kesenian</i>
431.21	<i>Gedung Kesenian</i>
431.22	<i>Padepokan</i>
431.23	<i>Lembaga Adat</i>
431.24	<i>Kegiatan adat/tradisi</i>
431.3	<i>Usaha pertunjukan, hiburan : Festival , pentas seni, promosi seni</i>
432	<i>Kepurbakalaan</i>
432.1	<i>Museum</i>
432.2	<i>Peninggalan Kuno</i>
432.21	<i>Candi, termasuk pemugaran</i>
432.22	<i>Benda Sejarah</i>
433	<i>Sejarah</i>
434	<i>Bahasa Daerah/ Nasional/ Internasional</i>
435	<i>Perizinan Pagelaran / Petunjuk Kesenian</i>
436	<i>Aliran Kepercayaan</i>
337	<i>Kesenian Adat</i>
440	KESEHATAN
440.1	<i>Kebijakan dan program pemerintah untuk kesehatan</i>
441	<i>Pembinaan Kesehatan</i>
441.1	<i>Gigi</i>
441.2	<i>Mata</i>
441.3	<i>Jiwa</i>
441.4	<i>Kanker</i>
441.5	<i>UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)</i>
441.6	<i>Perawatan</i>
441.7	<i>Kesehatan Masyarakat meliputi PKM, Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat melalui media PKK, Posyandu, dsb</i>
441.8	<i>Kesehatan Ibu dan Anak</i>
441.9	<i>JPSBK (Jaminan Pengaman Sosial Bidang Kesehatan)</i>
441.91	<i>JAMKESMAS/ JAMKESDA / JAMPERSAL</i>
441.92	<i>Jaminan lainnya</i>
441.93	<i>Gerakan Jum'at Bersih</i>
442	<i>Obat-obatan</i>
442.1	<i>Pengadaan</i>
442.2	<i>Pemeriksaan Obat</i>
442.3	<i>Penyimpanan Obat</i>
442.4	<i>Distribusi obat</i>
442.5	<i>Pengawasan Obat</i>
442.51	<i>Obat Generik</i>
442.52	<i>Obat Terlarang</i>
442.53	<i>Pemalsuan Obat</i>
443	<i>Pemberantasan dan pencegahan penyakit</i>
443.1	<i>Pencegahan Penyakit</i>
443.2	<i>Pemberantasan Penyakit Menular langsung (P.2.M.L)</i>
443.21	<i>Kusta</i>
443.22	<i>Kelamin, HIV, HIDS, IMS</i>
443.23	<i>Frambusia</i>



443.24	T.B.C
443.25	Kolera
443.26	SARS, dan jenis penyakit lainnya
443.3	Pemberantasan penyakit menular sumber binatang (P2B)
443.31	Malaria
443.32	Dengue Heemorrhagie Fever (DHF)
443.33	Filaria
443.34	Serangga
443.35	Rabies
443.36	Antrak
443.37	Leptosirosis
443.38	Chikungunya
443.39	Penyakit lainnya
443.4	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular
443.41	A. Pectoris
443.42	IMA (Irama Mastcmik Akut)
443.43	Hipertensi
443.44	Stroke
443.45	Diabetes Melitus
443.46	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit CA.Serviks
443.47	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit CA.Mammae
443.48	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit CA.Hepar
443.49	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit CA.Paru, Dan Penyakit Lainnya
443.5 .	Epidemiology dan Karantina (Epidka)
443.51	Imunisasi
443.52	Surveilanse
443.53	Pestisida
443.54	Pencemaran udara
443.55	Jamban Keluarga
443.56	Kesehatan Institusi
443.6	Higiene sanitasi
443.61	Tempat-tempat pembuatan dan penjualan makanan minuman (TPPMM), jasa boga
443,62	Sarana air minum
443.63	Pestisida, insektisida
443.64	Pencemaran
443.65	Jamban keluarga, Sanitasi rumah tangga
443.66	Kesehatan institusi, Misal : Poskestren, Sanitasi masjid dll
443,67	Higiene sanitasi CA. Mammae
443.68	Higiene sanitasi CA. Hepar
443.69	Higiene sanitasi CA. Paru
443.7	Kejadian khusus
443.71	Dekopensatiokordosis (Serangan jantung)
443.72	Asma
443.73	Psikosis
443,74	PPOM
443.75	Kecelakaan Lalu Lintas
443.76	Kejadian Luar Biasa (KLB)
444	Gizi dan Pengawasan Makanan
444.1	Kekurangan Makanan
444.2	Bahaya kelaparan, busung lapar ,gizi busuk
444.3	Keracunan Makanan
444.4	Menu makanan rakyat
444.5	Badan Pebaikan Gizi Daerah (BPGD)
444.6	Program Makanan Tambaan Anak Sekolah (PMT-AS)



444.7	Gondok endemic (GAKI)
445	RSU, RSJ, RS Khusus, PUSKESMAS, PUSKESMAS Keliling
445.1	Pelayanan Medis (Termasuk surat keterangan berkaitan dengan kondisis pasien, visum)
445.11	Rawat Inap
445.12	Rawat Jalan
445.13	IGD
445.14	IBS
445.15	ICU
445.16	MCU (Medical Check Up)
445.2	Penunjang Medis
445.21	Farmasi
445.22	Rekam Medik
445.23	Radiologi
445.24	Gizi
445.25	Laboratorium Klinik
445.26	Laboratorium Patologi Anatomi, Forensik
445.27	Bank Daerah Rumah Sakit
445.28	Sanitasi Rumah Sakit
445.29	CSSD / Laundry
445.3	Keperawatan
445.4	Komite Medik
445.5	SPI (Satuan Pengawas Internal)
445.6	Mutu Rumah Sakit
445.61	Akreditasi
445.62	ISO
445.63	PSBH (Problem Solving For Better Hospital)
445.64	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
445.7	IPAL (Instalasi Pengolahan Limbah)
445.8	Promosi Layanan Kesehatan
445.9	Kasus Hukum Rumah Sakit
446	Tenaga Medis
446.1	Perencanaan Tenaga Medis
446.2	Pendayagunaan Tenaga Medis
446.21	Perijinan Untuk Tenaga Medis
446.22	Kegiatan Bhakti Sosial Tenaga Medis
446.23	TKHI (Tenaga Kesehatan Haji Indonesia)
446.3	Diklat Tenaga Kesehatan / Medis
446.4	Diklat Tenaga Kesehatan / Para Medis
446.5	Pendidikan di Bidang Kesehatan Termasuk Pendidikan Spesialis
447	Peralatan Kesehatan
447.1	Standarisasi
447.2	Penyimpanan
447.3	Distribusi
447.4	Perijinan Berkaitan Dengan Alat Kesehatan
448	Pengobatan Alternatif
448.1	Pijat
448.2	Akupunktur
448.3	Jamu dan Herbal
448.4	Dukun
449	Lembaga Penyedia Layanan Kesehatan
449.1	PUSKESMAS dan PUSKESMAS Keliling
449.2	Poliklinik dan Balai Kesehatan
449.3	Rumah Bersalin
449.4	Posyandu
449.5	Laboratorium Kesehatan



449.6	Apotik
449.7	Sanatorium Kesehatan
450	AGAMA
450.1	Kebijakan dan Program Pemerintah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Bidang Keagamaan
450.2	Bantuan dibidang Keagamaan
451	Islam
451.1	Peribadatan
451.11	Sholat
451.12	Zakat, Infaq, Shodaqoh
451.13	Puasa
451.14	Umroh dan Haji
451.2	Rumah Ibadah (Masjid, Musholla, Surau)
451.3	Tokoh Agama
451.4	Pendidikan Agama
451.41	Pendidikan Tinggi Agama
451.42	Menengah , MTs, MA
451.43	Dasar, Pra Sekolah, MI
451.44	Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ/ Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren dll)
451.45	Sarana Pendidikan Meliputi Buku, Gedung Sekolah dll
451.46	Tenaga Pengajar
451.47	Dakwah (Pengajian, MTQ)
451.5	Wakaf
451.6	Mazhab Agama Islam
451.7	Organisasi Keagamaan bukan politik (Majelis Ulama Indonesia, Dewan Hisab Rukyat dll)
451.8	Tokoh Agama, Rohaniawan (Da'i)
452	Kristen Protestan
452.1	Peribadatan
452.2	Rumah Ibadah Gereja dll
452.3	Tokoh Agama, Rohaniawan (Pendeta, Domine dll)
452.4	Mazhab Agama Kristen Protestan
452.5	Organisasi Gerejani
453	Khatolik
453.1	Peribadatan
453.2	Rumah Ibadah Gereja dll
453.3	Tokoh Agama, Rohaniawan
453.4	Mazhab Agama Khatolik
453.5	Organisasi Gerejani
454	Hindu
454.1	Peribadatan
454.2	Rumah Ibadah Pura dll
454.3	Tokoh Agama, Rohaniawan
454.4	Mazhab Agama Hindu
454.5	Organisasi Agama Hindu
455	Budha
455.1	Peribadatan
455.2	Rumah Ibadah Candi, Vihara dll
455.3	Tokoh Agama, Rohaniawan
455.4	Mazhab Agama Budha
455.5	Organisasi Agama Budha
456	Aliran Sesat
460	SOSIAL
461	Rehabilitasi penyandang Cacat
461.1	Cacat Ganda



461.2	Cacat Fisik
461.3	Cacat Mental
462	Rehabilitasi Sosial
462.1	Gelandangan/orang terlantar, anak jalanan
462.2	Pengemis
462.3	Tuna susila
462.4	Anak nakal
462.5	Tuna wisma
463	Kesejahteraan anak dan keluarga
463.1	Anak Putus Sekolah
463.11	Pengarusutamaan Hak-hak Anak (PUHA)
463.12	Perlindungan Anak
463.13	Anak Asuh
463.2	Kualitas Hidup Perempuan
463.21	Perlindungan Perempuan
463.22	Ibu Teladan
463.23	Pengarusutamaan Gender (PUG)
464	Keperintisan dan Kepahlawanan
464.1	Pahlawan meliputi Penghargaan kepada Pahlawan, tunjangan kepada pahlawan dan jandanya
464.2	Perintis kemerdekaan meliputi Pembinaan, penghargaan dan tunjangan kepada Perintis Kemerdekaan
464.3	Cacat Veteran
465	Kesejahteraan Sosial
465.1	Lanjut Usia
465.2	Korban kekacauan, pengungsian, rehabilitasi
465.3	Masyarakat miskin: Raskin, BLT dll
466	Sumbangan sosial
466.1	Korban bencana
466.11	Jaminan sosial
466.2	Pencairan dana untuk sumbangan : Penyelenggaraan undian, ketangkasan, bazaar dsb
466.3	Panti Asuhan
467	Bimbingan sosial
467.1	Masyarakat suku terasing meliputi : bimbingan pendidikan, kesehatan, pemukiman, Pembinaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) dan sebagainya
468	PMI
469	Makam
469.1	Umum
469.2	Pahlawan
469.3	Khusus, Keluarga, Raja
469.4	Krematorium
470	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
470.1	Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kependudukan
471	PENDAFTARAN PENDUDUK
471.1	Identitas Penduduk
471.11	Biodata
471.12	Nomor Induk Kependudukan
471.13	Kartu Tanda Penduduk
471.1.4	Kartu Keluarga
471.15	Advokasi Identitas Penduduk
471.2	Perpindahan Penduduk dalam wilayah Indonesia
471.21	Perpindahan Penduduk WNI
471.22	Perpindahan Penduduk WNA dalam wilayah Indonesia
471.23	Perpindahan Penduduk WNA dan WNI tinggal sementara



471.24	Daerah Terbelakang
471.25	Bedol Desa
471.3	Perpindahan Penduduk Antar Negara
471.31	Penduduk Indonesia Ke Luar Negeri
471.32	Orang asing tinggal sementara
471.33	Orang asing tinggal tetap
471.34	Perpindahan penduduk antar Negara diwilayah perbatasan antar negara (pelintas batas tradisional)
471.4	Pendaftaran pengungsi dan penduduk rentan
471.41	Akibat bencana alam
471.42	Akibat kerusakan sosial
471.43	Pendaftaran penduduk daerah terbelakang
471.44	Pendaftaran penduduk rentan
472	PENCATATAN SIPIL
472.1	Kelahiran kematian dan advokasi
472.11	Kelahiran
472.12	Kematian
472.13	Advokasi Kelahiran dan Kematian
472.2	Perkawinan, perceraian dan advokasi
472.21	Perkawinan Agama Islam
472.22	Perkawinan Agama non Islam
472.23	Perceraian Agama Islam
472.24	Perceraian Agama non Islam
472.25	Advokasi Perkawinan dan Perceraian
472.3	Pengangkatan pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta dan advokasi
472.31	Pengangkatan anak
472.32	Pengakuan anak
472.33	Pengesahan anak
472.34	Perubahan akta
472.35	Pembatalan akta
472.36	Pengurusan Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak Serta Perubahan dan Pembatalan Akta
472.4	Pencatatan Kewarganegaraan
472.41	Akibat perkawinan
472.42	Akibat kelahiran
472.43	Non Perkawinan/ Non kelahiran
472.44	Naturalisasi
472.45	Perubahan WNI ke WNA
473	INFORMASI KEPENDUDUKAN
473.1	Teknologi Informasi
473.2	Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia
473.21	Daerah Maju
473.22	Daerah Berkembang
473.23	Daerah Terbelakang
472.3	Pengolahan Data Kependudukan
473.31	Pendaftaran Penduduk
473.32	Kejadian vital penduduk
473.33	Penduduk non registrasi
473.4	Pelayanan informasi kependudukan
473.41	Media Elektronik
473.42	Media Cetak
473.43	outlet
474	PERKEMBANGAN PENDUDUK
474.1	Pengarahan Kuantitas Penduduk
474.11	Struktur Jumlah



474.12	<i>Komposisi</i>
474.13	<i>Fertilitas</i>
474.14	<i>Kesehatan Reproduksi</i>
474.15	<i>Morbiditas Penduduk</i>
474.16	<i>Mortalitas Penduduk</i>
474.2	<i>Pengembangan Kuantitas Penduduk</i>
474.21	<i>Anak dan remaja</i>
474.22	<i>Penduduk usia produktif</i>
474.23	<i>Penduduk lanjut usia</i>
474.24	<i>Gender</i>
474.3	<i>Penataan Persebaran Penduduk</i>
474.31	<i>Migrasi antar wilayah</i>
474.32	<i>Migrasi Internasional</i>
474.33	<i>Urbanisasi</i>
474.34	<i>Sementara</i>
474.35	<i>Migrasi non Permanen</i>
474.4	<i>Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk</i>
474.41	<i>Pengembangan Sistem Perlindungan Penduduk</i>
474.42	<i>Pelayanan Kelembagaan Ekonomi</i>
474.43	<i>Pelayanan Kelembagaan Sosial Budaya</i>
474.44	<i>Partisipasi Masyarakat</i>
474.5	<i>Pengembangan Wawasan Kependudukan</i>
474.51	<i>Pendidikan Jalur Sekolah</i>
474.52	<i>Pendidikan Jalur Luar Sekolah</i>
474.53	<i>Pendidikan Jalur Masyarakat</i>
475	<i>TRANSMIGRASI</i>
475.1	<i>Penyiapan informasi daerah transmigrasi</i>
475.11	<i>Informasi potensi peluang bekerja dan berusaha di daerah transmigrasi</i>
475.12	<i>Perbandingan potensi daerah asal dan daerah transmigrasi</i>
475.13	<i>Permasyarakatan/ sosialisasi transmigrasi</i>
475.14	<i>Peran serta lembaga dan instansi terkait serta media massa dalam penyampaian informasi transmigrasi</i>
475.15	<i>Publikasi transmigrasi melalui pameran dan kesenian</i>
475.16	<i>Bimbingan dan penyuluhan transmigrasi bagi masyarakat daerah asal dan daerah transmigrasi</i>
475.17	<i>Kerjasama dibidang transmigrasi</i>
475.18	<i>Kepulangan transmigrasi karena daerah terjadi konflik</i>
475.2	<i>Pemukiman transmigrasi</i>
475.21	<i>Penggunaan tanah pemukiman transmigrasi</i>
475.22	<i>Pengembangan, struktur wilayah & analisis data wilayah transmigrasi</i>
475.23	<i>Tata ruang satuan kawasan pengembangan, study kelayakan dan dampak lingkungan transmigrasi</i>
475.24	<i>Teknis ruang satuan pemukiman dan lokasi/peta informasi pemukiman</i>
475.25	<i>Standarisasi dan spesifikasi teknis rumah transmigrasi, fasilitas umum/ sosial dan jaringan transportasi</i>
475.26	<i>Tanah pemukiman, pengadaan areal tanah dan pembebasannya, identifikasi, pengukuran dan pembuatan batas areal tanah</i>
475.27	<i>Penyelesaian masalah tanah di lokasi pemukiman transmigrasi</i>
475.28	<i>Tata ruang pemukiman transmigrasi</i>
475.281	<i>Rancangan dan pemanfaatan areal tanah</i>
475.282	<i>Rancangan kapling TSM</i>
475.283	<i>Pengukuran dan pembagian lahan pekarangan, lahan usaha dan fasilitas umum</i>



475.284	Penyelesaian kekurangan lahan usaha kepada transmigran dan sengketa tanah
475.285	Inventarisasi penataan kembali dan penggunaan areal tanah
475.286	Pengukuran batas unit pemukiman
475.287	Penyelesaian perubahan areal dan urusan perijinan pemanfaatan areal tanah
475.29	Sarana pemukiman transmigrasi
475.291	Pembinaan dan pengadilan, penyiapan bangunan rumah transmigran dan jamban keluarga dan fasilitas umum
475.292	Pembinaan dan pengendalian penyiapan sarana air bersih
475.293	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sumber energi
475.294	Pembinaan dan pengendalian peningkatan sarana
475.295	Pembinaan , pengendalian dan teknis peningkatan potensi lahan dan lingkungan
475.3	Pengerahan, pemindahan dan penempatan
475.3.1	Pengkajian dan pengembangan metode pengerahan dan penempatan
475.32	Teknis penyuluhan dan motivasi dalam pengerahan dan penempatan
475.33	Pengerahan
475.331	Pendaftaran dan seleksi calon transmigran
475.332	Berkas persyaratan dan administrasi calon transmigran
475.333	Transmigran yang dinyatakan lulus penyaringan
475.34	Pemberangkatan transmigran
475.341	Pengangkutan transmigran melalui laut, udara, dan darat
475.342	Jadwal dan tempat pelaksanaan pemberangkatan
475.343	Pelaksanaan pengurusan pemberangkatan
475.344	Pengawalan perjalanan transmigran
475.345	Pengaturan rute pemberangkatan
475.346	Alokasi penempatan dan surat perintah pemberangkatan
475.35	Penempatan transmigran
475.351	Kesiapan lokasi dan daya tampung
475.352	Pendataan transmigran di lokasi yang masih dibina
475.353	Data transmigran yang meninggalkan lokasi di setiap UPT
475.354	Pemantauan penempatan transmigrasi pengganti
475.4	Penampungan transmigrasi (transito), dan pelatihan transmigran
475.4.1	Pelatihan transmigran
475.411	Program pengajaran dan metode pelatihan
475.412	Penyusunan silabus dan modul pelatihan
475.413	Penyusunan calon peserta/pelatih
475.42	Penampungan transmigran di transito
475.421	Pelayanan kesehatan bagi transmigran
475.422	Pelayanan makanan bagi transmigran
475.423	Pelayanan pembekalan/peralatan bagi transmigran
475.5	Pembinaan masyarakat transmigrasi
475.5.1	Identifikasi dan penjajagan pembinaan
475.511	Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap penyesuaian
475.512	Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap pengembangan
475.513	Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap pembinaan
475.52	Pembinaan Pendidikan
475.521	Penyediaan/penyiapan sarana dan usaha pengembangan pendidikan
475.522	Pelaksanaan penyiapan tenaga pendidikan dan status
475.53	Pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat
475.54	Pembinaan kesehatan
475.541	Penyediaan sarana kesehatan dan KB



475.542	<i>Penanggulangan penyakit dan kejadian luar biasa</i>
475.543	<i>Pendistribusian bantuan pangan</i>
475.55	<i>Pembinaan rokhani</i>
475.551	<i>Bimbingan mental spiritual dan penyediaan petugas agama</i>
475.552	<i>Bimbingan adaptasi masyarakat</i>
475.553	<i>Bimbingan pelaksanaan penumbuhan interaksi sosial</i>
475.56	<i>Pelayanan pos di daerah transmigrasi</i>
475.57	<i>Penyerahan UPT yang layak untuk diserahkan</i>
475.58	<i>Penilaian transmigran teladan</i>
475.59	<i>Pemantauan dan penilaian kelayakan usaha</i>
476	KELUARGA BERENCANA
476.1	<i>Alat Kontrasepsi</i>
476.2	<i>Pelayanan KB meliputi KB Lestari, KB Mandiri</i>
476.3	<i>Penyuluh Lapangan KB (PLKB)</i>
476.4	<i>Pos KB desa</i>
476.5	<i>Akseptor KB</i>
477	-
478	-
479	-
480	MEDIA MASSA
480.1	<i>Kebijakan dan program Pemerintah dalam bidang media massa</i>
481	<i>Media cetak meliputi perijinan hingga pencabutan ijin bila terjadi pelanggaran</i>
481.1	<i>Surat kabar</i>
481.2	<i>Majalah</i>
481.3	<i>Buletin</i>
481.4	<i>Jurnal</i>
481.5	<i>Press Release, Klarifikasi Berita, Press Statistik</i>
481.51	<i>Perindustrian Perdagangan termasuk 9 harga pokok</i>
481.52	<i>Perekonomian dan Perbankan</i>
481.53	<i>Bidang lainnya</i>
481.6	<i>Layanan informasi/ Leaflet</i>
481.7	<i>Masukan Analisis Gubernur</i>
482	<i>Media Elektronik meliputi perijinan hingga pencabutan ijin bila terjadi pelanggaran</i>
482.1	<i>Radio</i>
482.2	<i>Televisi</i>
482.3	<i>Film Dokumenter</i>
482.4	<i>Pengawasan Lembaga Penyiaran</i>
482.5	<i>Kelompok Pemantau Isi Siaran</i>
482.6	<i>Pengkajian Isi Siaran</i>
482.7	<i>SDM Penyiaran</i>
483	<i>Periklanan</i>
483.1	<i>Ketentuan Pemasangan Reklame</i>
483.2	<i>Pameran</i>
484	<i>Kewartawanan/ Jurnalistik</i>
484.1	<i>Pembentukan Organisasi Profesi</i>
484.2	<i>Kasus-kasus kewartawanan</i>
484.3	<i>Penyalahgunaan Profesi</i>
484.4	<i>Bantuan kepada/ dari organisasi Profesi Wartawan</i>
484.5	<i>Musyawarah Wartawan Indonesia</i>
484.6	<i>Pendidikan Jurnalistik khusus wartawan</i>
484.7	<i>Temu Pers/ Konferensi Pers</i>
484.8	<i>Pers Tour</i>
484.9	<i>Kunjungan Wartawan Asing</i>
485	<i>Penyuluhan Masyarakat</i>



485.1	Publikasi
485.2	Pendirian information center
486	Pembinaan bidang Infokom
486.1	Training Photographi
486.2	Training Berita Jurnalistik
486.3	Bintek Infokom
486.4	Rakorda Infokom
486.5	Rakor Pengendalian Kegiatan
486.6	Pengelolaan Website Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
487	Hubungan Antar Lembaga
487.1	Non Pemerintah
487.11	Wahana Komunikasi Masyarakat
487.12	Lembaga Komunikasi Masyarakat
487.2	Lembaga Pemerintah
487.21	Pertemuan Bakohumas dan Kehumasan
487.22	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID)
487.3	Luar negeri
487.31	Promosi Luar negeri
487.32	Kunjungan Wartawan asing
488	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Informasi
489	Sistem Naskah Sosialisasi Kegiatan Gubernur
489.1	Himpunan Naskah Sambutan, Himpunan Paparan, Himpunan Keynote Speaker, Himpunan Rubrik dan Himpunan Dialog Interaktif
489.2	Dialog Interaktif
489.3	Rubrik
489.4	Materi/pointers Sambutan, Paparan, Naskah Keynote Speaker, Rubrik dan Dialog Interaktif
489.5	Pembuatan Kolom Khusus Hasil-Hasil Pembangunan
490	PENGADUAN LEWAT MEDIA
491	Tanggapan Balik atas Pengaduan
492	Publikasi
493	Bantuan Publikasi
494	
495	
500	PEREKONOMIAN
500.1	Dewan stabilitasi
501	Dewan Stabilisasi
501.1	Pengadaan Pangan
501.11	Ketersidian Pangan
501.12	Akses Pangan
501.13	Kerawanan Pangan
	Pencegahan dan penanggulangan Kerawanan Pangan
501.131	Pengembangan Desa Mandiri Pangan (Demapan)
501.132	Pengembang Daerah Rawan Pangan (PDRP)
501.133	Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
501.2	Distribusi dan Cadangan Pangan
501.21	Distribusi Pangan
501.22	Harga Pangan
502	Pengadaan Sandang
503	Perizinan pada umumnya. Untuk perizinan sesuai Bidang, Klasifikasi pada masalahnya
504	Statistik
510	PERDAGANGAN
510.1	Promosi perdagangan
510.11	Pekan raya
510.12	Iklan



510.13	Pameran
510.14	Event-event
510.15	Lomba-lomba (lomba desain, busana, kerajinan)
510.2	Pelelangan, distribusi
510.21	Pemasaran Sembako
510.22	Pemasaran hasil industri
510.23	Penentuan harga pokok
510.3	Bina usaha dan sarana Perdagangan
510.31	Renana dan program Kerja
510.32	Pelaksanaan Pelayanan administrasi
510.33	Pelaksanaan Teknis
510.34	Pemantauan
510.35	Evalusi dan Pelaporan
510.4	Perijinan (HO, Gangguan, Reklame, dll)
510.41	Pernerbitan SIUP
510.42	Perpanjangan
510.43	Ijin prinsip
510.44	Rekomendasi
510.5	Perdagangan antar pulau / kabupaten
510.51	Kerjasama bahan baku
510.52	Industri pemasaran
510.53	Kontrak
510.6	T e r a
510.61	Tera dan Tera ulang
510.62	Takaran
510.63	Timbangan dan anak Timbangan
510.64	Kalibrasi
510.65	Cap tanda tera
510.66	Biaya tera
510.7	Bantuan Peralatan
510.71	Proposal
510.72	Surat Perjanjian / Kontrak
510.73	Serah Terima
510.8	Perijinan / Rekomendasi Tanda Pabrik
510.9	Kemetrologian
510.91	Standart Tingkat Tiga
510.92	Standart Kerja Satuan Ukuran
510.93	Ukuran Metrologi
510.931	Peralatan
510.932	Laboratorium Metrologi Legal
510.933	Tanki Ukur Mobil
510.934	Meter Taxi
510.935	KWH Meter termasuk didalamnya listrik dan PDAM
510.936	S P B U
511	Pemasaran
511.1	Sembilan bahan pokok diantaranya beras, garam, minyak tanah, minyak goreng, sabun dll
511.2	Pasar
511.3	Pertokoan, kaki lima, kios
511.4	Pusat perbelanjaan
512	Ekspor
512.1	Ekspor Hasil Industri
512.2	Ijin Ekspor
512.3	Pengembangan Pasar Luar Negeri
512.4	Managemen Perdagangan Internasional
512.5	Eksport Hasil Industri



512.51	Kebijakan
512.52	Pemasaran
512.6	Pemberitahuan Eksport Barang
512.7	Pengawasan Mutu Barang
512.8	Eksportir Terdaftar
512.9	Evaluasi dan pelaporan
513	Impor
513.1	Ijin Impor
513.11	Pemberian ijin
513.12	Pengendalian ijin
513.2	Standart Mata Dagang Import
513.3	Management Perdagangan Internasional
513.4	Kegiatan Import
513.41	Pembinaan Import
513.42	Pengendalian Import
513.43	Pemantauan Import
513.5	Faktor-faktor Pendukung
513.6	Pengawasan mutu Barang Import
513.7	Penyaluran Kegiatan Import
513.71	Bahan Konsumsi
513.72	Bahan Baku
513.73	Bahan Penolong
513.8	Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Imprt
514	Perdagangan Antar Pulau
514.1	Kerjasama Bahan baku
514.2	Industri Pemasaran
514.3	Kontrak
515	Pengembangan Pontesi Perdagangan Luar Negeri
515.1	Promosi dan Informasi
515.2	Pameran
515.3	Kerjasama
516	Pergudangan , termasuk tangki penyimpanan minyak goreng
516.1	Peti kemas
516.2	Tangki Penyimpanan
517	Aneka Usaha Perdagangan
518	KOPERASI
518.1	Bina Usaha Koperasi
518.11	Koperasi Pertanian
518.12	Koperasi Non Pertanian
518.13	Permodalan Koperasi
518.131	Pemupukan Modal
518.132	Pemanfaatan Modal
518.133	Perbankan dan Asuransi
518.134	Permodalan Luar Koperasi
518.135	Kredit Program Umum
518.136	Kredit Program Khusus
518.14	Distribusi dan Jasa Koperasi
518.141	Distribusi Bahan Pokok
518.142	Distribusi Aneka Bahan
518.143	Distribusi Kerjasama Niaga
518.144	Jasa Angkutan
518.145	Jasa Perumahan
518.146	Aneka Jasa
518.15	Koperasi Kelistrikan, Industri dan Telekomunikasi
518.2	Bina Lembaga Koperasi
518.21	Organisasi Koperasi



518.211	Anggaran Dasar dan Akte Pendirian Koperasi
518.212	Pemberian Badan Hukum Koperasi
518.213	Penyelesaian Pembubaran Koperasi
518.214	Keragaan Koperasi
518.215	Pengakuan Koperasi Sekolah
518.216	Amalgamasi
518.217	Tertib Organisasi Koperasi
518.218	Penyelesaian Penyelesaian/ Persengketaan
518.219	Bimbingan Kesadaran Hukum
518.22	Bina Hubungan Alat Kelengkapan Organisasi Koperasi
518.221	Rapat Anggota Tahunan Koperasi
518.222	Pengurus dan Badan Pemeriksa
518.223	Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)
518.224	Badan Penasehat dan Pertimbangan Koperasi Unit Desa (BPP KUD)
518.23	Bina Tata Laksana Koperasi
518.231	Klasifikasi Koperasi Pedesaan
518.232	Klasifikasi Koperasi Perkotaan
518.233	Klasifikasi Koperasi Sekunder
518.24	Administrasi Ketatalaksanaan Koperasi
518.241	Administrasi Koperasi Pedesaan
518.242	Administrasi Koperasi Perkotaan
518.243	Karyawan/ Maneger Koperasi
518.244	Sumber Daya Manusia
518.245	Tenaga Kerja Sukarela Terdidik(TKST)
518.246	Penyaluran Alat Sekolah
518.247	Bantuan Pemda Kepada Koperasi/ KUD
518.25	Akuntansi
518.251	Akuntansi Koperasi Pedesaan
518.252	Akuntansi Koperasi Perkotaan
518.253	Akuntansi Koperasi Sekunder
518.26	Pengawasan Koperasi
518.261	Pengawasan Koperasi Primer
518.262	Pengawasan Koperasi Sekunder
518.263	Koperasi Jasa Audit
518.264	Kerjasama Kantor Akuntansi
518.27	Penyuluhan Koperasi
581.271	Pembinaan Kader Koperasi
518.272	Masyarakat Umum
518.273	Forum Komunikasi
518.274	Kelompok Tani
518.275	Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PKKL)
518.276	Penilaian Tingkat Nasioanl
518.3	Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
518.31	Pembinaan Usaha
518.311	Pembinaan Usaha Mikro
518.312	Pembinaan Usaha Kecil
518.313	Pembinaan Usaha Menengah
518.32	Pengawasan Usaha
518.321	Pengawasan Usaha Mikro
518.322	Pengawasan Usaha Kecil
518.323	Pengawasan Usaha Menengah
520	PERTANIAN
520.1	Orasarana dan Sarana Pertanian
520.11	Perluasan dan pengelolaan lahan
520.12	Basis Data Lahan
520.13	Pengendalian Lahan



520.14	<i>Optimalisasi, Rehabilitasi dan konservasi Lahan</i>
520.15	<i>Perluasan Lahan</i>
520.2	<i>Pengelolaan Irigasi</i>
520.2	<i>Pembiayaan Pertanian</i>
520.3	<i>Pupuk dan peptisida</i>
520.4	<i>Alat dan Mesin Pertanian</i>
521	<i>Tanaman Pangan</i>
521.1	<i>Pembenihan Tanaman Pangan</i>
521.11	<i>Penilaian Varietas</i>
521.12	<i>Pengawasan Mutu Benih</i>
521.13	<i>Produksi Benih serelia</i>
521.14	<i>Produksi Benih Aneka Umbi</i>
521.15	<i>Budidaya Serelia (Padi dan Non Padi)</i>
521.16	<i>Budidaya Aneka Kacang dan Umbi</i>
521.17	<i>Perlindungan Tanaman Pangan</i>
521.18	<i>Pascapanen Tanaman Pangan</i>
521.2	<i>Hortikultura</i>
521.21	<i>Pembenihan Hortikultura</i>
521.211	<i>Pembenihan Tanaman Buah</i>
521.212	<i>Pembenihan Tanaman Sayur</i>
521.213	<i>Pembenihan Tanaman Obat</i>
521.214	<i>Pembenihan Florikultura</i>
521.215	<i>Penilaian Varietas</i>
521.216	<i>Pengawasan Mutu Benih</i>
521.22	<i>Teknologi Budidaya</i>
521.221	<i>Tanaman Buah</i>
521.222	<i>Tanaman Sayur</i>
521.223	<i>Tanaman Obat</i>
521.224	<i>Tanaman Florikultura</i>
521.23	<i>Bimbingan Usaha Budidaya</i>
521.231	<i>Tanaman Buah</i>
521.232	<i>Tanaman Sayur</i>
521.233	<i>Tanaman Obat</i>
521.234	<i>Tanaman Florikultura</i>
521.24	<i>Teknologi Pascapanen</i>
521.25	<i>Srana Pascapanen</i>
521.26	<i>Teknologi Perlindungan Hortikultura</i>
521.27	<i>Penegendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Hortikultural</i>
521.28	<i>Dampak Perubahan Iklim</i>
521.29	<i>Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Pertanian</i>
521.3	<i>Pengelolaan Pemasaran Hasil Pertanian</i>
521.31	<i>Pengelolaan Hasil Pertanian</i>
521.32	<i>Mutu dan Standar</i>
521.33	<i>Pengembangan Usaha dan Investasi</i>
521.34	<i>Pemasaran</i>
522	<i>Kehutanan</i>
522.1	<i>Perencanaan Hutan</i>
522.11	<i>Survey</i>
522.111	<i>Survey PPA</i>
522.112	<i>Survey Areal</i>
522.113	<i>Survey Pembinaan Hutan</i>
522.114	<i>Survey Potensi Hutan</i>
522.12	<i>Pendataan/ Inventarisasi Areal Hutan</i>
522.121	<i>Data Areal Tata Guna Hutan</i>
522.122	<i>Data Areal Konservasi</i>
522.2	<i>Tata Guna Hutan</i>



522.21	Tata Ruang Kawasan
522.211	Pengurusan Kawasan Hutan
522.212	Penafsiran Hutan
522.213	Mutasi Hutan
522.22	Tata Hutan
522.221	Tata Hutan Sementara
522.222	Tata Hutan Tetap
522.223	Pembukaan Hutan
522.23	Pengukuran dan Pemetaan
522.3	Pengusahaan Hutan
522.31	Data Areal HPH
522.311	SK HPH
522.312	Kerja Sama
522.313	Pembatalan/ Penolakan
522.32	Modal dan Peralatan
522.321	Inventarisasi Logging
522.322	Inventarisasi Industri
522.323	Peralatan
522.324	Tenaga Kerja Pengusahaan Hutan
522.325	Pemegang Saham
522.326	Neraca Perusahaan
522.33	Rencana Kerja
522.331	KHPH
522.332	RKPH
522.34	Perpanjangan HPH
522.35	Produksi
522.351	Target Produksi
522.352	Produksi Kayu
522.353	Industri Non- Kayu
522.36	Industri
522.361	Industri Kayu HPH
522.362	Industri Kayu Non-HPH
522.363	Industri Non Kayu
522.37	Pembinaan HPH
522.371	Pelanggaran dan Sanksi
522.38	Pembangunan Hutan Tanaman Industri
522.381	Hutan Tanaman Industri Pulp
522.382	HTI Pertukaran
522.39	Iuran Hutan
522.4	Sarana Usaha
522.41	Standarisasi
522.411	Kayu
522.412	Non Kayu
522.42	Pengujian Hasil Hutan
522.43	Pengembangan
522.431	Pengembangan Perusahaan
522.432	Pengembangan Pemasaran
522.44	Pemasaran Hasil Hutan
522.45	SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan), Angkutan Hasil Hutan
522.451	Sarana dan Prasarana
522.452	Pembinaan dan Peningkatan Daya Hutan
522.46	Tata Usaha Hasil Hutan
522.47	PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat)
522.5	Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam
522.5.1	Konservasi Jenis



522.511	Satwa yang Dilindungi
522.512	Satwa yang Tidak Dilindungi
522.513	Lembaga Konservasi Satwa
522.514	Lembaga Konservasi Tumbuhan
522.52	Kawasan Konservasi
522.521	Cagar Alam (termasuk laut)
522.522	Suaka Margasatwa
522.523	Taman Wisata (termasuk laut)
522.524	Taman Nasional
522.525	Taman hutan Raya / Kebun Raya
522.526	Taman Baru
522.527	Hutan Lindung
522.53	Pengkajian Lingkungan
522.531	Amdal UKL, UPL, Di Dalam Kawasan
522.532	Amdal UKL, UPL, Di Luar Kawasan
522.54	Bina Cinta Alam
522.541	Kelompok Pecinta Alam
522.542	Kader Konservasi Sumber Daya Alam
522.543	Penyuluhan Konservasi Sumber Daya Alam
522.544	LSM Lingkungan
522.55	Pengamanan Hutan
522.551	Jaga Wana
522.552	PPNS
522.553	Gangguan Keamanan Hutan
522.554	Bencana Alam
522.555	Kebakaran Hutan
522.556	Sengketa Hutan
522.557	Hama dan Penyakit
522.558	Pestisida dan Pupuk Tanaman Hutan
522.559	Alat dan Mesin Kehutanan
522.6	Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan
522.61	Pembenihan
522.611	Tegakan Benih
522.612	Pengadaan Benih
522.613	Pengujian dan Penyimpanan Benih
522.614	Lalu Lintas Angkutan Benih
522.615	Pembibitan
522.616	Pengada dan Pengedar Bibit Bersertifikat
522.617	Pengada dan Pengedar Bibit Tidak Bersertifikat
522.62	Tanaman Reboisasi
522.621	Lahan Kritis
522.622	Reboisasi Lahan HPH
522.623	Rehabilitasi Tanah Hutan
522.624	Konservasi Tanah dan Air
522.625	Pengendalian Perladangan
522.626	Penghijauan
522.627	Aneka Usaha Kehutanan
522.63	Perhutanan Sosial
522.631	Sutera Alam
522.632	Minyak Kayu Putih
52.633	Perlebahan
522.7	Hutan Produksi
522.71	Hutan Produksi Terbatas
522.72	Hutan Produksi yang Dapat Dikonservasi
522.8	Kawasan Lindung
523	Perikanan



523.1	<i>Rencana, Program, Statistik, Prospek dan Pelaporan Bidang Perikanan dan Kelautan</i>
523.11	<i>Penyuluhan</i>
523.12	<i>Teknologi</i>
523.2	<i>Produksi Perikanan</i>
523.21	<i>Standarisasi Mutu Hasil Perikanan</i>
523.22	<i>Perikanan Budidaya : CBIB, CBIC</i>
523.23	<i>Sertifikasi Kesehatan ikan</i>
523.3	<i>Usaha Perikanan</i>
523.31	<i>Pelatihan Nelayan</i>
523.32	<i>Pembinaan Wanita Nelayan</i>
523.33	<i>Fasilitas Perijinan : SIUP, SIPI, SKP</i>
523.34	<i>Perbenihan</i>
523.4	<i>Pemasaran dan pengolahan hasil perikanan</i>
523.41	<i>Ekspor Hasil Perikanan</i>
523.42	<i>Impor Hasil Perikanan</i>
523.43	<i>Pemasaran Dalam Negeri</i>
523.44	<i>Pengusaha perikanan</i>
523.5	<i>Sarana perikanan</i>
523.51	<i>Pelabuhan Perikanan Pantai</i>
523.52	<i>TPI/ PPI</i>
523.53	<i>Kesyahbandaran</i>
523.54	<i>Peralatan penangkapan : kapal, perahu, jaring, pump dsb</i>
523.6	<i>Pengendalian hama dan penyakit</i>
523.61	<i>Penyakit ikan</i>
523.62	<i>Hama ikan</i>
523.63	<i>Obat-obatan termasuk sertifikasinya</i>
523.7	<i>Konservasi dan Suaka Laut</i>
523.71	<i>Transplantasi bibit karang</i>
523.72	<i>Terumbu karang</i>
523.73	<i>Mangrove</i>
523.74	<i>Garam</i>
523.75	<i>Harta karun di dalam laut</i>
523.76	<i>Pembinaan/ Pendidikan masyarakat pesisir</i>
524	<i>PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</i>
524.01	<i>Produksi</i>
524.1.1	<i>Perbibitan</i>
524.1.2	<i>Penyebaran dan Pengembangan Peternakan</i>
524.1.3	<i>Budidaya</i>
524.2	<i>Usaha Peternakan</i>
524.2.1	<i>Pelayanan Usaha</i>
524.2.2	<i>Pengolahan Hasil dan Pemasaran</i>
524.2.3	<i>Pengembangan SDM dan Kelembagaan Peternakan</i>
524.3	<i>Kesehatan Hewan</i>
524.3.1	<i>Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan</i>
524.3.2	<i>Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan</i>
524.3.3	<i>Obat-obatan Hewan</i>
524.3.4	<i>Pelayanan Kesehatan Hewan</i>
524.4	<i>Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan</i>
524.4.1	<i>Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan</i>
524.4.2	<i>Hygieni dan Sanitasi</i>
524.4.3	<i>Produk Hewani</i>
524.5	<i>Laboratorium Kesehatan Hewan</i>
524.5.1	<i>Pengujian Mutu Asal Hewan</i>
524.5.2	<i>Pengujian Mutu Produk Bahan Asal Hewan</i>
524.6	<i>Inseminasi Buatan</i>



524.6.1	<i>Produksi Distribusi dan Pemasaran</i>
524.6.2	<i>Pemeliharaan Ternak dan Pelayanan Reproduksi</i>
524.7	<i>Pembibitan dan Budi Daya Ternak</i>
524.71	<i>Ternak Non Ruminansia</i>
524.72	<i>Ternak Ruminansia</i>
525	<i>Perkebunan</i>
525.1	<i>Pembenihan</i>
525.11	<i>Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih</i>
525.111	<i>Pelaporan</i>
525.112	<i>Monitoring</i>
525.113	<i>Statistik Perkebunan</i>
525.12	<i>Produksi Benih</i>
525.121	<i>Karet</i>
525.122	<i>T e h</i>
525.123	<i>Tembakau</i>
525.124	<i>Tebu</i>
525.125	<i>Cengkeh</i>
525.126	<i>Kelapa/ Kopra/ Kelapa sawit</i>
525.127	<i>Kopi</i>
525.128	<i>Kakao</i>
525.129	<i>Jenis Tanaman yang lain</i>
525.13	<i>Kelembagaan Benih</i>
525.131	<i>Kelompok tani</i>
525.132	<i>Kemitraan</i>
525.133	<i>Rekomendasi ijin usaha perkebunan</i>
525.2	<i>Bubidaya Perkebunan</i>
525.21	<i>Penyiapan dan Penerapan Teknologi Bubidaya Tanaman Semusim</i>
525.22	<i>Penyiapan dan Penerapan Teknologi Bubidaya Tanaman rempah</i>
525.23	<i>Penyiapan dan Penerapan Teknologi Bubidaya Tanaman Tahunan</i>
525.3	<i>Perlindungan Tanaman</i>
525.31	<i>Organisme Pengganggu Tumbuhan</i>
525.311	<i>Hama</i>
525.312	<i>Pestisida</i>
525.32	<i>Iklim dan Pencegah Kebakaran</i>
525.321	<i>Agensia Pengendalian Hayati</i>
525.4	<i>Alat dan Mesin Perkebunan</i>
525.41	<i>Power Sprayer</i>
525.42	<i>Hand Sprayer</i>
525.43	<i>Polibag</i>
525.44	<i>Alat Laboratorium Perkebunan</i>
525.45	<i>Reagen</i>
525.46	<i>Sarana/ Alat Produksi Perkebunan</i>
525.47	<i>Pengolahan lahan</i>
525.471	<i>Terasering</i>
525.5	<i>Pembinaan Usaha</i>
525.51	<i>Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan</i>
525.511	<i>Sosialisasi</i>
525.512	<i>Penyuluhan / Informasi</i>
525.52	<i>Gangguan Usaha dan Penanganan Komplik</i>
526	<i>Ketahanan pangan</i>
526.1	<i>Program Bimbingan Massal</i>
526.2	<i>Pengembangan Sarana Sumber Daya</i>
526.2.1	<i>Pembinaan Teknologi</i>
526.2.2	<i>Sarana Produksi dan Permodalan</i>
526.2.3	<i>Kelembagaan</i>
526.	<i>Agrobisnis</i>



526.3	Mutu Hasil
526.3.1	Pengelola Hasil Pangan
526.3.2	Pemasaran Hasil
526.3.3	Kementriaan
526.4	Distribusi Pangan
526.4.1	Sistem dan pola Distribusi
526.4.2	Sarana dan Prasarana Distribusi
526.4.3	Pengadaan dan Cadangan Pangan
526.5	Kewaspadaan dan Keanekaragaman Pangan
526.5.1	Rawan Pangan, Keamanan dan Mutu Pangan
526.5.2	Pola Konsumsi Pangan Masyarakat
526.5.3	Sistem Informasi Pangan
527	Penyuluhan dan Pengembangan SDM
527.1	Penyuluhan
527.11	Program dan Kerjasama Meliputi : Kebijakan Teknis, rencana dan Program, Kerjasama, pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyuluh
527.12	Informasi dan Materi Penyuluh
527.13	Kelembagaan Penyuluh
527.131	Struktural
527.132	Non Struktural
527.14	Ketenagaan Penyuluh
527.15	Kelembagaan Petani
527.151	Kelompok Petani
527.152	Gapoktan
527.153	Kelompok Taruna Tani
527.154	Kelompok Tani Lainnya
527.16	Usaha Tani
527.161	Pelaku Utama Pelaku Usaha
527.162	Promosi/ Pameran/ Kampanye
527.163	Penghargaan/ Lomba
528	
529	
530	PERINDUSTRIAN
530.1	Undang-undang Gangguan
531	Industri Logam
532	Industri Mesin/ Elektronik
533	Industri Kimia/ Farmasi
534	Industri Tekstil
535	Industri Makanan/ minuman
536	Aneka Industri/ Perusahaan
536.1	Home Industri
537	Aneka Kerajinan
537.1	Kerajinan Rakyat
538	Usaha Negara
538.1	Perjan
538.2	Perum
538.3	Persero
539	Perusahaan Daerah/ BUMD
539.1	PDAM
539.2	PLN
539.3	Bank Umum
539.4	BPD
540	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
541	Minyak dan Gas Bumi
541.1	Pengusahaan



541.11	Perijinan
541.12	Rekomendasi
541.13	Kontrak Karya
541.14	Pengolahan
541.2	Penyaluran
541.3	Tangki, Pompa, Tanker
542	Energi
542.1	Energi alternatif
542.11	Gas Rawa
542.12	Bahan Bakar Nabati (Biofuel)
542.13	Biogas
542.14	Energi baru terbarukan
542.15	Perijinan
542.16	Rekomendasi
542.17	Pembinaan dan Pengawasan
542.2	Konservasi Energi
542.3	Pemetaan Energi
542.4	Rencana Umum Perencanaan Energi Daerah (RUPED)
543	Pertambangan, mineral dan batubara
543.1	Wilayah Usaha Pertambangan (WIUP)
543.11	WIUP Batuan
543.12	WIUP Bukan Logam
543.13	WIUP Logam
543.14	WIUP Batubara
543.2	Rekomendasi Teknis
543.3	Perijinan
543.31	IUP Eksplorasi
543.32	IUP Operasi Produksi
543.33	IUP Operasi Produksi Khusus
543.34	Ijin Usaha Jasa Pertambangan
543.35	Pencabutan Ijin
543.4	Pembinaan
543.5	Pengawasan
543.51	Pengawasan Usaha Pertambangan
543.52	Penerbitan Kegiatan Pertambangan
543.6	Pasca Tambang
543.61	Reklamasi
543.62	Penutupan
544	Air tanah
544.1	Cekungan Air Tanah (CAT)
544.11	Pemetaan CAT
544.12	Imbuhan CAT
544.13	Lepasan CAT
544.14	Konservasi
544.15	Pengendalian Daya Rusak
544.2	Rekomendasi Teknis
544.3	Sumur Artesis
544.4	Sumur Bor
544.5	Sumur Gali (Pasak)
544.6	Pengusaha Pengebor (APATINDO)
544.7	Sumur Pantau
544.8	Harga Dasar Air/ Nilai Perolehan Air
544.9	Hidrologi
545	Geologi
545.1	Pemetaan
545.2	Mitigasi Bencana Geologi



545.3	Vulkanologi
545.31	Pengawasan Vulkanologi
545.32	Panas Bumi
545.4	Hidrogeologi
545.5	Gerakan Tanah (Longsoran, amblesan)
545.6	Pengawasan, pengendalian
546	Hidrologi
547	Kesamudraan
548	Penghematan Energi
550	PERHUBUNGAN
551	Perhubungan Darat
551.1	Lalu lintas jalan raya, sungai, danau
551.11	Keamanan Lalu Lintas, Rambu-rambu
551.12	Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor (Keur)
551.13	Kecelakaan Lalu Lintas
551.2	Angkutan Jalan Raya
551.21	Perizinan
551.22	Terminal
551.23	Alat Angkutan
551.24	Jembatan Timbang/ Lebih Muatan
551.25	Uji Mutu
551.3	Angkutan Sungai
551.31	Keselamatan, Rambu-rambu
551.32	Lalu Lintas
551.33	Alur dan Kolam Pelabuhan
551.34	Trayek
551.35	Sarana/ Kapal
551.36	Pelabuhan
551.37	Terminal
551.38	Kecelakaan
551.39	Perizinan
551.4	Angkutan Danau
551.41	Keselamatan, Rambu-rambu
551.42	Lalu Lintas
551.43	Alur dan Kolam Pelabuhan
551.44	Trayek
551.45	Sarana/ Kapal
551.46	Pelabuhan
551.47	Terminal
551.48	Kecelakaan
551.49	Perizinan
551.5	Perkereta-Apian
551.51	Sarana meliputi Lokomotif, Gerbong, Bogie
551.52	Prasarana (Jalan/ Jembatan)
551.53	Trayek
551.54	Angkutan Penumpang
551.55	Angkutan Barang
551.56	Keselamatan
551.57	Kecelakaan
551.58	Perawatan/ Perbaikan
551.59	Perizinan
552	Perhubungan Laut
552.1	Lalu Lintas Angkutan Laut
552.11	Pelayaran Dalam Negeri
552.12	Pelayaran Luar Negeri
552.13	Pelayaran Haji



552.14	<i>Pelayaran Charter/ Wisata Turis</i>
552.15	<i>Pelayaran Khusus</i>
552.16	<i>Keamanan Lalu Lintas, Rambu-rambu</i>
552.2	<i>Perkapalan-Alat Angkutan</i>
552.21	<i>Kapal Penumpang</i>
552.22	<i>Kapal Barang</i>
552.23	<i>Kapal Perang/ Patroli/ Negara</i>
552.24	<i>Kapal Tanker</i>
552.25	<i>Ponton/ Tongkang</i>
552.26	<i>Kapal Layar</i>
552.27	<i>Kapal Layar Motor</i>
552.28	<i>Kapal Kontainer</i>
552.3	<i>Pelabuhan</i>
552.31	<i>Tanah/ Lokasi</i>
552.32	<i>Alur Layar</i>
552.33	<i>Dermaga</i>
552.34	<i>Terminal Penumpang</i>
552.35	<i>Terminal Kontainer</i>
552.36	<i>Bangunan/ Gedung/ Gudang</i>
552.37	<i>Perlengkapan Tambat Labuh</i>
552.38	<i>Lapangan Penumpukan</i>
552.39	<i>Pelabuhan Khusus/ Dermaga Khusus</i>
552.4	<i>Pengerukan/ Perawatan</i>
552.41	<i>Alur Pelayaran</i>
552.42	<i>Kolam Pelabuhan</i>
552.43	<i>Reklamasi Pantai</i>
552.44	<i>Dumping Area</i>
552.45	<i>Pekerjaan Bawah Air (Salvage)</i>
552.5	<i>Penjagaan Pantai</i>
552.51	<i>Patroli Bandar</i>
552.52	<i>Patroli Perairan</i>
552.53	<i>Penjagaan Pantai & Penanggulangan Keselamatan di Laut (GAMAT)</i>
552.6	<i>Angkutan Barang</i>
552.61	<i>P O S</i>
552.62	<i>Minyak</i>
552.63	<i>L o g</i>
552.64	<i>Ternak</i>
552.65	<i>Sembilan Bahan Pokok</i>
552.66	<i>Peti Kemas / EMKL</i>
552.67	<i>Muatan Umum</i>
552.68	<i>Barang Dalam Negeri, Barang Luar Negeri</i>
552.69	<i>Bongkar Muatan</i>
552.7	<i>Keselamatan</i>
552.71	<i>Rambu-rambu/ Mercu suar</i>
552.72	<i>Kelaikan Kapal/ Pembangunan Kapal</i>
552.73	<i>Fasilitas Keselamatan/ Keamanan</i>
552.74	<i>Telekomunikasi Pelayaran</i>
552.75	<i>Sertifikasi Kesempurnaan Kapal</i>
552.76	<i>Sertifikasi Awak Kapal</i>
552.8	<i>Kecelakaan, Gangguan</i>
552.81	<i>Kecelakaan Penumpang/ Kapal</i>
552.82	<i>Kecelakaan Barang</i>
552.83	<i>Gangguan Sarana/ Prasarana</i>
552.84	<i>Pembajakan/ Penyeludupan</i>
552.85	<i>Pencemaran</i>
552.9	<i>Perijinan</i>



552.91	<i>Ijin Berlayar</i>
552.92	<i>Ijin Pekerjaan Bawah Air</i>
552.93	<i>Ijin Pembuatan dan Perubahan Bentuk Kapal</i>
552.94	<i>Ijin Pembukaan Kantor Cabang</i>
552.95	<i>Ijin Usaha Angkutan Laut</i>
552.96	<i>Ijin Usaha Penunjang Angkutan Laut</i>
552.97	<i>Ijin Pelayanan Jasa Kepelabuhan</i>
552.98	<i>Ijin Pembangunan Pelabuhan Khusus</i>
552.99	<i>Ijin Pembangunan Dermaga Khusus</i>
553	<i>Perhubungan Udara</i>
553.1	<i>Lalu Lintas Angkutan Udara</i>
553.11	<i>Penerbangan Domestik</i>
553.12	<i>Penerbangan Luar Negeri</i>
553.13	<i>Penerbangan Haji</i>
553.14	<i>Penerbangan Charter/ Non Reguler</i>
553.15	<i>Penerbangan Khusus/ Jembatan Udara</i>
553.2	<i>Pelabuhan Udara</i>
553.21	<i>Tanah/ Lokasi</i>
553.22	<i>Landasan</i>
553.23	<i>Apron</i>
553.24	<i>Terminal Penumpang</i>
553.25	<i>Terminal Cargo</i>
553.26	<i>Bangunan/ Gedung</i>
553.27	<i>Perlengkapan</i>
553.28	<i>Parkir Kendaraan</i>
553.3	<i>Alat Angkutan</i>
553.31	<i>Pesawat Udara</i>
553.32	<i>Helikopter</i>
553.4	<i>Angkutan Barang</i>
553.41	<i>P o s</i>
553.42	<i>Muatan Dalam Negeri</i>
553.43	<i>Muatan Luar Negeri</i>
553.44	<i>EMPU</i>
553.5	<i>Sertifikasi Kelaikan</i>
553.51	<i>Kelaikan Pesawat Udara</i>
553.52	<i>Kelaikan Peralatan Penunjang</i>
553.53	<i>Kelaikan Personil/ Awak Kapal</i>
553.6	<i>Keselamatan</i>
553.61	<i>Rambu-rambu</i>
553.62	<i>Perakitan/ Kalibrasi</i>
553.63	<i>Fasilitas Keselamatan</i>
553.64	<i>Telekomunikasi Penerbangan</i>
553.7	<i>Kecelakaan/ Gangguan</i>
553.71	<i>Kecelakaan Penumpang</i>
553.72	<i>Kecelakaan Barang</i>
553.73	<i>Gangguan Sarana/ Prasarana</i>
553.74	<i>Pembajakan</i>
553.75	<i>Pencemaran</i>
553.8	<i>Umum</i>
553.81	<i>Asuransi</i>
553.82	<i>Asosiasi</i>
553.83	<i>SATPAM</i>
553.84	<i>Rally Udara/ Lomba</i>
553.9	<i>Perizinan</i>
553.91	<i>Izin Terbang/ Flight Approval</i>
553.92	<i>Usaha Kegiatan Penunjang Penerbangan / EMPU</i>



553.93	Pembukaan Kantor Cabang
553.94	Rekomendasi Ketinggian Bangunan
553.95	Pembangunan Bandar Udara Khusus
554	POS
554.1	Pembinaan
554.11	Kebutuhan fasilitas
554.12	Rehabilitasi/ Perawatan
554.13	Bina Usaha/ Pengawasan/ Penerbitan
554.14	Standarisasi Perangkat
554.15	Tanah/ Bangunan
554.16	Filateli
554.17	Asosiasi
554.18	Laporan dan Evaluasi
554.2	Pelayanan
554.21	Jasa pos
554.22	Jasa titipan
554.23	Jasa giro
554.24	Benda pos/ perangko
554.25	Sampul peringatan
554.26	Jasa pos Elektronik
554.3	Perijinan
554.31	Rekomondasi usaha Jasa pos/ Titipan
554.32	Pembukaan Agen/ Cabang
554.4	Gangguan Sarana dan Prasarana
554.41	Kecelakaan
554.42	Sabotase
554.43	Penyeludupan
555	Teknologi Informasi
555.1	Kebijakan
555.2	Peralatan
555.21	Telepon
555.22	Internet/ USO
555.23	Telegram, Telex/ SBB, Faximile
555.24	Satelit, Stasiun Bumi
555.25	Radio Kumunikasi
555.3	Sistem
555.4	Pembinaan / Penertiban
555.5	Perijinan
556	Pariwisata dan Rekreasi
556.1	Usaha Pariwisata
556.11	Usaha Jasa Pariwisata
556.111	Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata
556.112	Restoran dan Rumah Makan
556.12	Ijin Usaha Obyek dan Atraksi Wisata
556.13	Pengusaha Obyek dan Daya Tarik Wisata
556.14	Usaha Sarana Pariwisata
556.141	Ijin Pariwisata
556.142	Ijin Usaha Pariwasata
556.143	Ijin Usaha Jasa Pariwisata
556.144	Ijin Pengusaha Objek dan Daya Tarik Wisata
556.145	Ijin Usaha Sarana
556.15	Wisatawan
556.151	Wisatawan Nusantara
556.152	Wisatawan Mancanegara
556.16	Promosi dan Informasi Pariwisata
556.161	Dalam Negeri



556.162	Luar Negeri
556.2	Perhotelan
556.21	Status Hotel
556.22	Kelas Hotel
556.23	Tarif
556.3	Travel Service
556.31	Pramu Wisata
556.32	Biro Perjalanan / Angkutan Wisata
556.33	Souvenir
556.34	Kemudahan Wisata (Visa, Bea Cukai, Karantina)
556.4	Tempat Rekreasi
556.41	Obyek dan Daya Tarik Wisata
556.411	Ciptaan Tuhan
556.412	Hasil Karya Manusia
556.42	Rehabilitasi / Perawatan
556.43	Pengembangan Fasilitas
556.44	Tanah / Bangunan
556.45	Bina Usaha
556.46	Institusi
556.461	Asosiasi
556.462	Lembaga kepariwisataan
557	Metereologi
557.1	Curah Hujan
557.2	Hujan Buatan
557.3	Peneropongan Bintang
560	TENAGA KERJA
560.1	Data Permintaan TKI / TKW Dari Luar Negeri
560.11	Data Persediaan TKI / TKW Dari Daerah
560.2	Job Order TKI Ke Luar Negeri oleh PJTKI
560.3	Rekrutmen Calon TKI / TKW
560.4	Seleksi Naker Ke Luar Negeri
560.41	Pendaftaran dan Seleksi Calon TKI / TKW
560.42	Berkas Persyaratan Calon TKI / TKW
560.43	Pemeriksaan dan Hasil Cek Kesehatan TKI / TKW
560.5	Persyaratan Naker TKI / TKW
560.51	Permohonan Rekomendasi Passport
560.52	Perjanjian Kerja TKI/TKW
560.53	Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KITKI)
560.54	Permohonan Fiskal Ke Luar Negeri
560.55	Pelatihan TKI/TKW
560.6	Pemberangkatan Naker
560.61	Pemberangkatan ke Luar Negeri
560.62	Pembekalan Akhir Pemberangkatan TKI/TKW ke Luar Negeri
560.63	Berita Acara Serah Terima TKI/TKW
560.7	Pemulangan Naker
560.71	Kepulangan TKI/TKW karena Kontraknya Habis
560.72	Pemulangan TKI/TKW Ilegal
560.73	TKI/TKW Terkena Kasus Pidana
561	Upah
561.1	Kegiatan dan Hasil Sidang Dewan Penelitian Pengupahan Daerah/ Nasional
561.2	Pemohonan Penangguhan Pelaksanaan Pembayaran Upah Minimum Kabupaten/ Kota dan Provinsi
561.3	Kebutuhan Fisik Minuman
561.4	Perhitungan Upah Kerja (termasuk didalamnya upah lembur)
561.5	Laporan Data Remittance



561.6	Pembayaran Gaji/Upah TKI/TKW
562	Penempatan
562.1	Penempatan Naker Penempatan Naker Mandiri Terdidik (TKMT)
562.11	Penempatan Naker Mandiri Profesional (TKMP)
562.12	Penempatan Naker Non Terdidik dan Non Profesional
562.13	Pengembangan Kesempatan Berusaha/Peluasan Kerja
562.2	Kesepakatan Kerja Bersama
562.3	Lembaga Penyalur Naker
562.31	Ijin Pendirian Lembaga Penyaluran Naker Antar Kerja Lokal/Daerah Dan Antar Kerja Negara (AKAN)
562.32	Data Evaluasi Kinerja Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI/BKS/BKK)
562.33	Pencabutan Ijin Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI, BKK, BKS)
563	Latihan Kerja
563.1	Pendidikan Pekerja
563.11	Pendidikan dan Latihan Kerja
563.12	Diklat di Dalam Negeri (PKL, Prakerin, OJT)
563.13	Diklat di Luar Negeri (Pemagangan)
563.2	Sarana dan Prasarana Latihan Kerja
563.21	Tempat Pelatihan (BLK)
563.22	Instruktur/Pelatihan
563.23	Modul/Silabus dan Bahan Praktek
563.24	Kurikulum dan Metode Pengajaran
563.25	Sertifikat
563.3	Kerjasama Pelatihan Tenaga Kerja
564	Tenaga Sukarela
564.1	Butsi
564.2	Padat Karya
565	Perselisihan Pekerja
565.1	Perselisihan dan Perkara Hukum Naker
565.11	Pengaduan Perkara Pekerja / NAKER
565.12	Pemeriksaan Perkara Pekerja / NAKER
565.13	Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pekerja / NAKER
565.14	Sidang Perkara Perselisihan Pekerja / NAKER
565.15	Hasil Putusan Sidang Perkara Perselisihan Pekerja (NAKER)
565.16	Peninjauan Kembali Hasil Putusan Sidang KP2K (PAD/P4P)
565.17	Permintaan Eksekusi Terhadap hasil Keputusan KP2K (PAD/P4P)
565.18	Daftar Usulan, Susunan dan Penetapan Anggota KP2K (PAD/P4P)
565.2	Pemogokan/Unjuk Rasa Tenaga Kerja
566	Keselamatan Kerja
566.1	Instalasi Proteksi Kebakaran
566.2	Pemakaian Alat Keselamatan Kerja
566.3	Keterangan Kelayakan atau Pelindung Diri (APD) dalam bekerja
566.4	Pengangkatan dan Pembinaan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
566.5	Pelatihan/Pembinaan Hyperkes dan Keselamatan Kerja
566.6	Pengujian dan Hasil Pemeriksaan Hyperkes
566.7	Gangguan Lingkungan Tempat Usaha
566.8	Perlengkapan Sarana Kerja
566.81	Pemasangan dan Pemakaian Lift (pesawat angkat/angkut)
566.82	Pemasangan dan Pemakaian Uap (ketel uap)
566.83	Pemasangan dan Pemakaian Motor Diesel
566.84	Pemasangan dan Pemakaian tangki tak bertekanan
566.85	Pemasangan dan Pemakaian Alat Pemadam Kebakaran
566.9	Ijin Tenaga Kerja Wanita Masuk malam hari (shifht malam)
567	Pemutusan Hubungan Kerja
567.1	Pengaduan PHK sepihak



567.2	PHK massal
567.3	Bantuan hukum bagi pekerja yang di PHK
567.4	Ijin melakukan PHK
567.5	Perhitungan masa kerja bagi pekerja yang di PHK
567.6	Pemberian uang tunggu bagi pekerja yang di PHK
567.7	Pemberian uang pesangon bagi pekerja yang di PHK
568	Kesejahteraan Pekerja
568.1	Bantuan Kredit/bantuan Modal kerja bagi Naker
568.11	Pemilihan Pekerja Teladan
568.2	Perumahan Pekerja
568.3	Keikutsertaan Pekerja Dalam Program Jamsostek
568.4	Koperasi Pekerja
568.5	Sarana Transportasi Pekerja
568.6	Perpustakaan Pekerja
568.7	Tempat Ibadah Pekerja
568.8	Rekreasi dan Olah Raga Pekerja
568.9	Pendirian, Pendaftaran, dan Kegiatan Organisasi Pekerjaan
568.91	Lembaga Kerjasama Bipartid
569	Tenaga Kerja Orang Asing
569.1	Rekomendasi Perpanjangan Ijin Kerja Tenaga Asing (IKTA)
569.2	Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
569.3	Kualifikasi Keahlian Tenaga Kerja Asing
569.4	Perjanjian Kerja Dengan Tenaga Asing
569.5	Data Tenaga Kerja Asing
569.6	Kecelakaan/Kematian Tenaga Kerja Asing
569.7	Pemulangan Tenaga Kerja Asing
569.8	Pemberdayaan dan Kontribusi Tenaga Kerja Asing
569.9	Tenaga Kerja Asing Ilegal
570	PENANAMAN MODAL
571	Penanaman Modal Dalam Negeri
572	Penanaman Modal Asing
573	Modal Patungan (joint venture/penyertaan modal)
574	Pasar Uang dan Modal
575	Saham
576	Koperasi
577	Perizinan Penanaman Modal
578	-
579	-
580	PERBANKAN MONETER
581	Kredit
582	Investasi
583	Tabungan
583.1	Deposito
583.2	Tabanas
583.3	Taska
583.4	Tapelpram
584	Bank Pembangunan Daerah
584.1	Bank Kaltim
584.2	BKK, BPR BKK, Bank Pasar
585	Asuransi
585.1	Dana Kecelakaan Lalu Lintas
585.2	Polis
585.3	Premi
585.4	Tertanggung/Pemegang Polis
585.5	Uang Pertanggungan



586	Alat Pembayaran meliputi check, giro wesel, transfer
587	Fiscal
588	Hutang Negara Obligasi
589	Moneter
590	AGRARIA
591	Tata Guna Tanah
591.1	Pemetaan dan Pengukuran
591.2	Perpetaan
591.3	Penyediaan Data, Peta dan Publikasi
591.4	Fakta Tata Guna Tanah
591.5	Tanah Kritis
592	Landreform
592.1	Redistribusi
592.11	Pendaftaran Pemilik dan Pengurus Tanah Pertanian
592.12	Penentuan Tanah Objek Landreform
592.13	Pembagian Tanah Landreform
592.14	Sengketa Redistribusi Tanah Objek Landreform
592.2	Ganti Rugi
592.21	Ganti Rugi Tanah Kelebihan
592.22	Sengketa Ganti Rugi Tanah Kelebihan
592.23	Ganti Rugi Tanah Absentee
592.24	Sengketa Ganti Rugi Tanah Absentee
592.25	Ganti Rugi Tanah Partikelir
592.26	Sengketa Ganti Rugi Tanah Partikelir
592.3	Bagi Hasil
592.31	Penetapan Imbangan Gadai Tanah
592.32	Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil
592.33	Sengketa Perjanjian Bagi Hasil
592.4	Gadai Tanah
592.41	Pendaftaran Pelaksanaan Gadai tanah
592.42	Pelaksanaan Gadai Tanah
592.43	Sengketa Gadai Tanah
592.5	Bimbingan dan Penyuluhan
592.6	Pengembangan
592.7	Yayasan Dana Landreform (YDL)
593	Pengurusan Hak-Hak Tanah
593.1	Penyusunan Program dan Bimbingan Teknis
593.11	Sewa Tanah
593.12	Sewa Tanah Untuk Tanaman Tertentu : Tebu, Tembakau, Rosela, Corchorus.
593.2	Hak Milik
593.21	Perorangan
593.22	Badan Hukum
593.3	Hak Pakai
593.31	Perorangan
593.311	Warga Negara Indonesia
593.312	Warga Negara Asing
593.32	Badan Hukum
593.321	Badan Hukum Indonesia
593.322	Badan Hukum Asing, Kedutaan, Konsulat, Kantor Dagang Asing
593.33	Tanah Gedung-Gedung Negeri
593.4	Guna Usaha
593.41	Perkebunan Besar
593.42	Perkebunan Rakyat
593.43	Peternakan
593.44	Perikanan



593.45	Kehutanan
593.5	Hak Guna Bangunan
593.51	Perorangan
593.52	Badan Hukum
593.53	P3MB (Panitia Pelaksanaan Pengusaha Milik Belanda)
593.54	Badan Hukum Asing Belanda- PBK No.5 / 56
593.55	Pemulihan Hak (Pen Pres 4 / 1960)
593.6	Hak Pengelolaan
593.61	PN Perumnas, Bonded Ware House, Industrial Estate, Real Estate
593.62	Perusahaan Daerah Pembangunan Perumahan
593.7	Sengketa Tanah
593.71	Peradilan Perkara Tanah (lihat juga 183)
593.8	Pencabutan dan Pembebasan Tanah
593.81	Pencabutan Hak
593.82	Pembebasan Tanah
593.83	Ganti Rugi Tanah
594	Pendaftaran Tanah
594.1	Pengukuran/ Pemetaan
594.11	Fotogrametri
594.12	Terristris
594.13	Triangulasi
594.14	Peralatan
594.2	Dana Pengukuran (Permen Agraria No.6/ 1960)
594.3	Sertifikat
594.4	Pejabat Pembuatan Akte Tanah
595	Lahan Transmigrasi
595.1	Tata Guna Tanah
595.2	Landreform
595.3	Pengurusan Hak-hak Tanah
595.4	Pendaftaran Tanah
600	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN
601	Tata Bangunan, Kontruksi, Industri Kontruksi
602	Pemilihan Rekanan / Pemborong
602.1	Lelang
602.2	Penunjukan
602.3	Prakualifikasi
602.4	Daftar Rekanan Mampu (DRM)
602.5	Tanda Daftar Rekanan (TDR)
603	Arsitektur
603.1	Perencanaan
603.2	Bule print
603.3	Rencana Anggaran Biaya
604	Bahan Bangunan
604.1	Tanah dan Batu
604.2	Aspal
604.3	Besi dan Logam Lainnya
604.31	Besi Beton
604.32	Besi Profil (Konstruksi)
604.33	Paku
604.34	Alumunium Profil
604.4	Bahan Bahan Perlindungan dan Pengawet (Cat, Tech, oil, Pengawet Kayu)
604.5	Semen
604.6	Kayu
604.7	Bahan Penutup Atap
604.8	Alat Alat Penggantung dan Pengunci

604.9	Bahan Bahan Bangunan Lainnya
605	I n s t a l a n s i
605.1	Instalansi Bangunan
605.2	Instalansi Listrik
605.3	Instalansi Air / Sanitasi
605.4	Instalansi Pengatur Udara
605.5	Instalansi Akustik
605.6	Instalansi Cahaya / Penerangan
606	Konstruksi Pencegahan
606.1	Konstruksi Pencegahan Terhadap Kebakaran
606.2	Terhadap Gempa
606.3	Terhadap Angin / Udara / Panas
606.4	Terhadap Kegaduhan
606.5	Terhadap Gas / Explosive
606.6	Terhadap Serangga
606.7	Terhadap Radiasi Atom
607	-
608	-
610	P E N G A I R A N
611	Irigasi
611.1	Bangunan Waduk
611.11	Bendungan
611.12	Tanggul
611.13	Pelimpahan banjir
611.14	Menara pengambilan
611.15	Pembangunan dermaga
611.2	Bangunan pengambilan
611.21	Bendungan
611.22	Bendungan dengan pintu bilas
611.23	Bendungan dengan pompa
611.24	Pengambilan bebas
611.25	Pengambilan bebas dengan pompa
611.26	Sumur dengan pompa
611.27	Kantung lumpur
611.28	Silf ekstretor
611.29	Escope chenel
611.3	Bangunan pembawa
611.31	Saluran
611.311	Saluran Induk
611.312	Saluran sekunder
611.313	Suplesi
611.314	Tersier
611.315	Saluran kwarter
611.316	Saluran pasangan
611.317	Saluran tertutup/terowongan
611.32	Bangunan
611.321	Bangunan bagi
611.322	Bangunan dan sadap
611.323	Bangunan sadap
611.324	Bangunan check
611.325	Bangunan terjun
611.33	Bax Tersier
611.34	Got miring
611.35	Talang
611.36	Syphon
611.37	Gorong-gorong

611.38	<i>Pelimpahan samping</i>
611.4	<i>Bangunan Pembuangan</i>
611.41	<i>Saluran</i>
611.411	<i>Saluran Pembuangan induk</i>
611.412	<i>Saluran Pembuangan sekunder</i>
611.413	<i>Saluran Pembuangan tersier</i>
611.42	<i>Bangunan</i>
611.421	<i>Bangunan out let</i>
611.422	<i>Bangunan terjun</i>
611.423	<i>Bangunan penahan banjir</i>
611.43	<i>Gorong-gorong pembuangan</i>
611.44	<i>Talang pembuang</i>
611.45	<i>Syphon pembuangan</i>
611.5	<i>Bangunan lainnya</i>
611.51	<i>Jalan</i>
611.511	<i>Jalan Inspeksi</i>
611.512	<i>Jalan Logistik</i>
611.52	<i>Jembatan</i>
611.521	<i>Jembatan Inspeksi</i>
611.522	<i>Jembatan Hewan</i>
611.53	<i>Tangga Cuci</i>
611.54	<i>Kubangan Kerbau</i>
611.55	<i>Waduk Lapangan</i>
611.56	<i>Bangunan Penunjang</i>
611.57	<i>Jaringan Telepon</i>
611.58	<i>Stasiun Argo</i>
611.59	<i>Bangunan TPI dan Pasar Ikan</i>
612	<i>Polder</i>
612.1	<i>Tangul Keliling</i>
612.11	<i>Tanggul</i>
612.12	<i>Bangunan Penutup Sungai</i>
612.13	<i>Jembatan</i>
612.2	<i>Bangunan Pembawa</i>
612.21	<i>Saluran</i>
612.211	<i>Saluran Muka</i>
612.212	<i>Saluran Pembawa Induk</i>
612.213	<i>Saluran Pembawa Sekunder</i>
612.214	<i>Saluran Stasiun Pompa Pemasukan</i>
612.22	<i>Bangunan Bagi:</i>
612.221	<i>Gorong-Gorong</i>
612.222	<i>Syphon</i>
612.3	<i>Bangunan Pembuangan</i>
612.31	<i>Stasiun Pompa Pembuangan</i>
612.32	<i>Saluran</i>
612.321	<i>Saluran Pembawa Induk</i>
612.322	<i>Saluran Pembawa Sekunder</i>
612.33	<i>Pintu Air Pembuangan</i>
612.34	<i>Gorong-gorong Pembuangan</i>
612.35	<i>Syphon Pembuangan</i>
612.4	<i>Bangunan Lainnya</i>
612.41	<i>Bangunan</i>
612.411	<i>Bangunan Pengukur Air</i>
612.412	<i>Bangunan Pengukur Curah Hujan</i>
612.413	<i>Bangunan Gudang Stasiun Pompa</i>
612.414	<i>Bangunan Listrik Stasiun Pompa</i>
612.42	<i>Rumah Petugas Eksploitasi</i>



613	Pasang Surut
613.1	Bangunan Pembawa
613.11	Saluran Pembawa Induk
613.12	Saluran Pembawa Sekunder
613.13	Saluran Pembawa Tersier
613.14	Saluran Penyimpanan Air
613.15	Saluran Pintu Pembuangan
613.2	Bangunan Pembuangan
613.21	Saluran Pembawa Induk
613.22	Saluran Pembawa Sekunder
613.23	Saluran Pembawa Tersier
613.24	Saluran Penyimpanan Air
613.25	Saluran Pintu Pembuangan
613.3	Bangunan Lainnya
613.31	Kolom Pasang
613.32	Saluran
613.321	Saluran Lalu Lintas
613.322	Saluran Muka
613.33	Bangunan
613.331	Bangunan Penangkis Kotoran
613.332	Bangunan Pengukur Muka Air
613.333	Bangunan Pengukur Curah Hujan
613.34	Jalan
613.35	Jembatan
614	Pengendalian Sungai
614.1	Bangunan Pengaman
614.11	Tanggul Banjir
614.12	Pintu Pengatur Banjir
614.13	Klep Pengatur Banjir
614.14	Tembok Pengaman Talut
614.15	Krib
614.16	Kantung Lumpur
614.17	Check Dam
614.18	Syphon
614.2	Saluran Pengaman
614.21	Saluran Banjir
614.22	Saluran Drainage
614.23	Corepure
614.3	Bangunan Lainnya
614.31	Warning System
614.32	Stasiun
614.321	Stasiun Pengukur Curah Hujan
614.322	Stasiun Pengukur Air
614.323	Stasiun Pengukur Cuaca
614.324	Stasiun Pos Penjagaan
615	Pengaman Pantai
615.1	Tanggul
615.2	Krib
615.3	Bangunan Lainnya
616	Air Permukaan (Danau, Waduk, Sungai)
616.1	Stasiun Pompa
616.2	Bangunan Pembawa
616.3	Bangunan Pembuangan
616.4	Bangunan Lainnya
620	JALAN
621	Jalan Kota / Kabupaten



621.1	Daerah Penguasaan
621.11	Tanah
621.12	Tanaman
621.13	Bangunan
621.2	Bangunan Sementara
621.21	Jalan Sementara
621.22	Kantor Proyek
621.23	Gedung Proyek
621.24	Barak Kerja
621.25	Laboratorium Lapangan
621.26	Rumah
621.3	Badan Jalan
621.31	Pekerjaan Tanah (Earth Work)
621.32	Stabilisasi
621.4	Perkerasan
621.41	Lapisan Pondasi Bawah
621.42	Lapisan Pondasi
621.43	Lapisan Permukaan
621.5	Drainage
621.51	Parit Tanah
621.52	Gorong -Gorong (Culvert)
621.6	Buku Trotoir
621.61	Tanah
621.62	Perkerasan
621.63	Pasangan
621.7	Medium
621.71	Tanah
621.72	Tanaman
621.73	Perkerasan
621.74	Pasangan
621.8	Daerah Sampingan
621.81	Tanaman
621.82	Pagar
621.9	Bangunan Pelengkap dan Pengamanan
621.91	Rambu-rambu / Tanda-tanda Lalu Lintas
621.92	Lampu Penerangan
621.93	Lampu Pengaturan Lalu Lintas
621.94	Patok-patok KM
621.95	Patok-patok R.O.W.(Sempadan)
621.96	Rel Pengamanan
621.97	Pagar
621.98	Turap Penahan
621.99	Bronjong
622	Jalan Provinsi
622.1	Daerah Penguasaan
622.11	Tanah
622.12	Tanaman
622.13	Bangunan
622.14	Jalan Sementara
622.15	Jembatan Sementara
622.16	Kantor/ Gedung Proyek
622.17	Barak Kerja
622.18	Laboraturium Lapangan
622.19	Rumah
622.2	Badan Jalan
622.21	Pekerjaan Tanah (Earth Work)



622.22	Stabilisasi
622.3	Perkerasan (Pavement)
622.31	Lapis Pondasi Bawah
622.32	Lapis Pondasi
622.33	Lapis Permukaan
622.4	Drainage
622.41	Parit
622.42	Gorong-gorong (culvert)
622.43	Buku Trotoir
622.44	Tanah
622.45	Perkerasan
622.5	Trotoir
622.51	Tanah
622.52	Perkerasan
622.6	Medium
622.61	Tanah
622.62	Tanaman
622.63	Perkerasan
622.64	Pasangan
622.7	Daerah samping
622.71	Tanaman
622.72	Pagar
622.8	Bangunan Perlengkapan dan Pengamanan
622.81	Rambu-rambu
622.82	Lampu penerbangan
622.83	Lampu Pengatur lalu lintas
622.84	Patok-patok KM
622.85	Patok-patok R, O, W (Sempadan)
622.86	Rel pengamanan
622.87	Pagar
622.88	Turap penahan
622.89	Bronjong
633	Jalan Nasional
633.1	Daerah penguasaan
633.2	Badan jalan
633.3	Perkerasan (lapis pondasi, lapis permukaan)
633.4	Drainase (gorong-gorong, parit)
633.5	Median
633.6	Daerah samping (pagar, tanaman)
633.7	Bangunan pelengkap dan pengamanan (rambu-rambu)
630	JEMBATAN
631	Jembatan pada jalan Kota/Kabupaten
631.1	Daerah penguasaan
631.11	Tanah
631.12	Tanaman
631.13	Bangunan
631.2	Bangunan sementara
631.21	Jalan sementara
631.22	Jembatan sementara
631.23	Kantor proyek
631.24	Gedung proyek
631.25	Barak kerja
631.26	Laboratorium lapangan
631.27	Rumah
631.3	Pekerjaan Tanah (earth work)
631.31	Galian tanah



631.32	Timbunan tanah
631.4	Pondasi
631.41	Pondasi kepala jembatan
631.42	Pondasi Pilar
631.43	Pondasi angker
631.5	Bangunan bawah
631.51	Kepala jembatan
631.52	Pilar
631.53	Piloon
631.54	Landasan
631.6	Bangunan
631.61	Gelagar
631.62	Lantai
631.63	Perkerasan
631.64	Jalan orang/trotoir
631.65	Sandaran
631.66	Talang air
631.7	Bangunan pengaman
631.71	Turap/penahan
631.72	Bronjong
631.73	Strek Dam
631.74	Kist Dam
631.75	Coupute
631.76	Krip
631.8	Bangunan pelengkap
631.81	Rambu-rambu/tanda-tanda lalu lintas
631.82	Patok pengamanan
631.83	Patok R, O, W (Sempadan
631.9	Oprit
631.91	Badan
631.92	Perkerasan
631.93	Drainage
631.94	Baku
631.95	Mediun
632	Jembatan pada jalan Provinsi
632.1	Daerah Penguasaan
632.11	Tanah
632.12	Tanaman
632.13	Bangunan
632.2	Bangunan sementara
632.21	Jalan sementara
632.22	Jembatan sementara
632.23	Kantor proyek
632.24	Gedung proyek
632.25	Barak kerja
632.26	Laboratorium lapangan
632.27	Rumah
632.3	Pekerjaan Tanah (earth work)
632.31	Galian tanah
632.32	Timbunan tanah
632.4	Pondasi
632.41	Pondasi kepala jembatan
632.42	Pondasi Pilar
632.43	Pondasi angker
632.5	Bangunan bawah
632.51	Kepala jembatan



632.52	Pilar
632.53	Piloon
632.54	Landasan
632.6	Bangunan
632.61	Gelagar
632.62	Lantai
632.63	Perkerasan
632.64	Jalan orang/ trotoir
632.65	Sandaran
632.66	Talang air
632.7	Bangunan pengaman
632.71	Turap/ penahan
632.72	Bronjong
632.73	Strek Dam
632.74	Kist Dam
632.75	Coupute
632.76	Krip
632.8	Bangunan pelengkap
632.81	Rambu-rambu/ tanda-tanda lalu lintas
632.82	Patok pengamanan
632.83	Patok R, O, W (Sempadan)
632.9	Oprit
632.91	Badan
632.92	Perkerasan
632.93	Drainage
632.94	Baku
632.95	Mediun
633	Jembatan pada jalan Nasional
633.1	Daerah Penguasaan (tanah, tanaman, bangunan)
633.2	Bangunan sementara (gudang proyek, kantor proyek)
633.3	Pondasi
633.4	Bangunan bawah
633.5	Bangunan (gelagar, lantai, sandaran, perkerasan)
633.6	Bangunan Pengamanan (bronjong strek dam, krib)
633.7	Bangunan pelengkap dan pengaman (rambu-rambu)
640	BANGUNAN
641	Bangunan Pemerintah
641.1	Gedung Pengadilan
641.2	Rumah Pejabat Negara
641.3	Gedung DPR
641.4	Gedung Balai Kota
641.5	Penjara
641.6	Perkantoran
642	Bangunan Pendidikan
642.1	Taman Kanak-kanak
642.2	SD & Sekolah Menengah
642.3	Perguruan Tinggi
643	Bangunan Rekreasi
643.1	Bangunan Olah Raga
643.2	Gedung Kesenian
643.3	Gedung Pemancar
644	Bangunan Perdagangan
644.1	Pusat Perbelanjaan
644.2	Gedung Perdagangan
644.3	B a n k
644.4	Perkantoran



645	Bangunan Pelayanan Umum
645.1	Mandi, Cuci, Kakus (MCK) Umum
645.2	Gedung parkir
645.3	Rumah Sakit
645.4	Gedung telkom
645.5	Terminal Angkutan Umum
645.6	Terminal Angkutan Air
645.7	Terminal Angkutan Darat
645.8	Bangunan Keagamaan
646	Bangunan Peninggalan Sejarah
646.1	Monumen
646.2	Candi
646.3	Kraton
646.4	Rumah Tradisional
647	Bangunan Industri
648	Bangunan Tempat Tinggal
648.1	Rumah Perkantoran
648.11	Inti / Sederhana
648.12	Sedang / Mewah
648.2	Rumah Pedesaan
648.21	Rumah Contoh
648.3	Real estate
649	Elemen bangunan
649.1	Pondasi
649.11	Diatas Tiang
649.2	Dinding
649.21	Penahan beban
649.22	Tidak menahan beban
649.3	A t a p
649.4	Lantai / langit-langit
649.41	Suspendend
649.42	Solit
649.5	Pintu / jendela
649.51	Pintu hermonik
649.52	Pintu biasa
649.53	Pintu sorong
649.54	Jendela kayu
649.55	Jendela sorong
649.56	Jendela vertical
650	TATA KOTA
651	Daerah Perdagangan / Pelabuhan
651.1	Daerah Pusat Perbelanjaan
651.2	Daerah Perkantoran
652	Daerah Pemerintahan
653	Daerah Perumahan (Site dan Servei)
653.1	Kepadatan Rendah (Low Density)
653.2	Kepadatan Tinggi (High Density)
654	Daerah Industri
654.1	Industri Berat
654.2	Industri Ringan
654.3	Industri Rumah (Home Industri)
655	Daerah Rekreasi (Open Spece)
655.1	Publik Garden
655.2	Sport dan Playing Fields
655.3	Open Spece
656	Transportasi (Tata Letak)



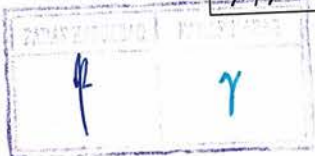
656.1	Jaringan Jalan
656.11	Penerangan Jalan
656.2	Jaringan Kereta Api
656.3	Jaringan Sungai
657	Assineering
657.1	Saluran Pengumpulan
657.2	Instansi Pengolahan
657.21	Bangunan
657.22	Bangunan Penyaring
657.23	Bangunan Penghancur Kotoran
657.24	Bangunan Pengendapan
657.25	Bangunan Pengering Lumpur
657.26	Unit Disinfektan
657.27	Unit Perpompaan
658	Kesehatan Lingkungan
658.1	Persampahan
658.11	Bangunan Pengumpulan
658.12	Bangunan Pemusnahan
658.2	Pengotoran Udara
658.3	Pengotoran Air
658.31	Air Buangan Industri
658.4	Kegaduhan
658.5	Kebersihan Kota
660	TATA LINGKUNGAN
660.1	Lingkungan Hidup
660.2	Kebersihan Lingkungan
660.3	Pencemaran
660.31	Pencemaran Air
660.32	Pencemaran Udara
660.33	Pencemaran Tanah
660.34	Pencemaran Limbah Padat dan Bahan Berbahaya Beracun (B3)
661	Kerusakan Lingkungan
661.1	Konservasi Pesisir dan Laut
661.2	Konservasi Sumber Daya Alam
662	Pentaatan Hukum Lingkungan
663	Laboratorium Lingkungan
663.1	Air
663.2	Udara
663.3	Tanah
664	Analisis Dampak Lingkungan
665	Pengembangan Teknologi Lingkungan
666	Pengembangan Kapasitas
667	Pengamanan Lingkungan
670	KETENAGAAN
670.1	Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD)
671	Listrik
671.1	Kelistrikan
671.11	Perijinan
671.12	Rekomendasi
671.13	Pembinaan dan Pengawasan
671.11	Kelistrikan PLN
671.12	Kelistrikan non PLN
671.2	Pembangkit Tenaga Listrik
671.21	PLTA - Pembangkit Listrik Tenaga Air
671.22	PLTD - Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
671.23	PLTG - Pembangkit Listrik Tenaga Gas



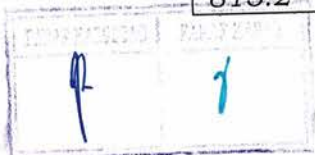
671.24	PLTM - Pembangkit Listrik Tenaga Matahari
671.25	PLTN - Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
671.26	PLTN - Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
671.27	PLTU - Pembangkit Listrik Tenaga Uap
671.3	Transmisi tenaga listrik
671.31	Gardu Induk/gardu penghubung/gardu trafo
671.32	Saluran Udara Tenaga Listrik
671.33	Kabel Bawah Tanah
671.4	Distribusi Tenaga Listrik
671.41	Gardu Distribusi
671.42	Tegangan Menengah
671.43	Tegangan Rendah
671.44	Jaringan Bawah Tanah
671.5	Pengusahaan Listrik
671.51	Sambungan Listrik
671.52	Penjualan Tenaga Listrik
671.53	Tarif Listrik
672	Tenaga Air
673	Tenaga Minyak
674	Tenaga Gas
675	Tenaga Matahari
676	Tenaga Nuklir
677	Tenaga Panas Bumi
678	Tenaga Uap
679	Tenaga Lainnya
680	PERALATAN PEKERJAAN UMUM
681	-
690	AIR MINUM
690.1	Hak pengelolaan
690.2	Perusahaan pengelolaan air minum
690.21	BUMD/PDAM
690.22	Swasta
690.23	Perorangan
690.24	Laporan pengelolaan
690.25	Penyertaan modal pemerintah
691	Intako
691.1	Broncapterin
691.2	Sumur
691.3	Bendungan
691.4	Saringan (screen)
691.5	Pintu air
691.6	Saluran pembawa
691.7	Alat ukur
691.8	Perpompaan
692	Transmisi air baku
692.1	Perpipaan
692.2	Katup Udara (Air Rolief)
692.3	Tutup penguras (blow oof)
692.4	Bak pelepas tekanan
692.5	Jembatan pipa
692.6	Syphon
693	Instalasi pengelolaan
693.1	Bangunan Ukur
693.2	Bangunan Aerasi
693.3	Bangunan Pengendapan
693.4	Bangunan Pembubuh bahan kimia



693.5	Bangunan Pengaduk
693.6	Bangunan Saringan
693.7	Perpompaan
693.8	Clear Hell
694	Distribusi
694.1	Reservoir menara bawah tanah
694.11	Menara
694.12	Reservoir menara bawah tanah
694.2	Perpipaan
694.3	Perpompaan
694.4	Jembatan pipa
694.5	Syphon
694.6	Hydran
694.61	Hydran umum
694.62	Hydran kebakaran
694.7	Katup
694.71	Katup Udara (air relief)
694.72	Katup pelepas (blow off)
694.8	Bak pelepas tekanan (pressuer reducing valve)
700	PENGAWASAN
701	Kebijakan dan program pengawasan
702	Pengawasan perencanaan pengadaan/proyek
703	Pengawasan Organisasi dan Tata Laksana
704	Pengawasan Inventarisasi Asset
705	Pengawasan Perpustakaan/Kearsipan
706	Pengawasan Penelitian/Riset
707	Pengawasan Perhubungan, Komunikasi Informasi dan Teknologi
708	Pengawasan Pertahanan/BPN
709	-
710	BIDANG PEMERINTAHAN
711	Pengawasan Pemerintah Pusat
712	Pengawasan Pemerintah Provinsi
713	Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kotamadya
714	Pengawasan Pemerintah Desa
715	Pengawasan MPR/DPR
716	Pengawasan DPRD Provinsi
617	Pengawasan DPRD Kabupaten/ Kota
618	Pengawasan Bidang Hukum
619	Pengawasa Bidang Hubungan Luar Negeri
720	BIDANG POLITIK
721	Pengawasan Partai termasuk pendanaan partai, atribut partai dll
722	Pengawasan pembinaan ipoleksosbud hankam
723	Pengawasan organisasi meliputi organisasi kemasyarakatan, profesi, wanita, buruh/tani dan kepemudaan
724	Pengawasan terhadap kepercayaan terhadap Tuhan YME
730	BIDANG KEAMANAN/ KETERTIBAN
731	Pengawasan Kesbangpolinmas
732	Pengawasan pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam/ SAR
740	BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
741	Pengawasan Pembangunan Desa
742	Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan
743	Pengawasan Kebudayaan
744	Pengawasan Kesehatan/ Makanan/ Obat
745	Pengawasan SARA (Suku Agama Ras)
746	Pengawasan Kesejahteraan Sosial
747	Pengawasan Kependudukan Migrasi/ Urbanisasi



748	Pengawasan Kehumasan, Media Massa dan Penyiaran
749	Pengawasan Bantuan/ Subsidi Masyarakat
750	BIDANG PEREKONOMIAN
751	Pengawasan Perdagangan dan perindustrian
752	Pengawasan Pertanian dan Perkebunan
753	Pengawasan Kehutanan
754	Pengawasan Pertambangan/ ESDM
755	Pengawasan Peternakan dan Kesehatan Hewan
756	Pengawasan Tenaga Kerja dan Ketrasmigrasian
757	Pengawasan PMDN/ PMA
758	Pengawasan Perbankan/ Moneter
759	Pengawasan Kelautan dan Perikanan
760	BIDANG PEKERJAAN UMUM
761	Pengawasan Pengairan
762	Pengawasan Jalan
763	Pengawasan Jembatan
764	Pengawasan Bangunan
765	Pengawasan Tata Ruang Kota
766	Pengawasan Tata Lingkungan
767	Pengawasan Ketenagaan
768	Pengawasan Air Minum
770	PENGAWASAN PEJABAT PUBLIK
771	Penyimpangan Pejabat Publik
780	BIDANG KEPEGAWAIAN
781	Pengawasan Pengadaan PNS
782	Pengawasan Penilaian dan Disiplin PNS
783	Keanggotaan PNS dalam Parpol
784	Penyimpangan pejabat/ PNS
785	Persengketaan PNS
790	BIDANG KEUANGAN
791	Pengawasan Anggaran
792	Pengawasan Akuntansi
793	Pengawasan Perbendaharaan
794	Pengawasan Pengelolaan Kas Daerah
795	Pengawasan Pendapatan
800	KEPEGAWAIAN Termasuk klasifikasi disini : Kebijakan Kepegawaian
800.1	Perencanaan
800.2	Penelitian
800.3	Pengaduan
800.4	Team
800.5	Statistik
800.6	Pendataan
800.7	Peraturan Perundang Undangan
800.8	
810	PENGADAAN Meliputi Lamaran, pengujian kesehatan dan pengangkatan calon pegawai
811	Pendaftaran CPNS
811.1	Testing
811.2	Screening
811.3	Pengumuman tes dan Pemanggilan
812	Pengujian Kesehatan
813	Pengangkatan CPNS
813.1	Pengangkatan CPNS golongan I
813.2	Pengangkatan CPNS golongan II



813.3	Pengangkatan CPNS golongan III
813.4	Pengangkatan CPNS golongan IV
813.5	Pengangkatan Calon Guru Inpre
820	MUTASI Meliputi Pengangkatan, Kenaikan gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Pemindahan, Deta Sering, Tugas belajar dan wajib militer
821	Pengangkatan
821.1	Pengangkatan CPNS Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
821.11	Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan I
821.12	Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan II
821.13	Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan III
821.14	Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan IV
821.15	Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Yang Cuti diluar tanggungn negara
821.2	Mutasi
821.21	Pengangkatan dalam jabatan struktural, pembebasan dari jabatan,
821.22	Pengangkatan dalam jabatan fungsional, pemberhentian sementara, pengangkatan kembali, pernyataan menduduki jabatan, sumpah janji
821.23	Berita acara serah terima jabatan, pernyataan menduduki jabatan, sumpah janji
821.3	Sekjen/ Dirjen/ Irjen/ Kaban
821.4	Kepala Biro/ Direktur/ Inspektur/ Kepala Pusat/ Sekretaris/ Kepala Dinas/ Asisten Sekwilda
821.5	Kepala Bagian/ Kepala Sub Direktorat/ Kepala Bidang/ Inspektur Pembantu
821.6	Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi/ Kepala Sub Bidang/ Pemeriksa
821.7	Camat
821.8	Lurah Adminstratip (Lurah Desa Lihat 141)
821.9	Jabatan Lainnya
822	Kenaikan Gaji Berkala
822.1	PNS Golongan I
822.2	PNS Golongan II
822.3	PNS Golongan III
822.4	PNS Golongan IV
823	Kenaikan Pangkat
823.1	PNS Golongan I
823.2	PNS Golongan II
823.3	PNS Golongan III
823.4	PNS Golongan IV
824	Pemindahan/ Pelimpahan/ Pembantuan
824.1	PNS Golongan I
824.2	PNS Golongan II
824.3	PNS Golongan III
824.4	PNS Golongan IV
824.5	Fungsional
825	Datasering dan Penempatan Kembali
826	Penunjukan Tugas Belajar
826.1	Proses seleksi
826.2	Tugas Belajar Pasca Sarjana/ Doktoral
826.3	Tugas Belajar Sarjana
826.4	Tugas Belajar non gelar
826.5	Dalam Negeri
826.6	Luar Negeri
826.7	Double degree
826.8	Tunjangan Belajar
826.9	Penempatan Kembali



827	Izin Belajar
827.1	Proses Izin Belajar
827.2	Izin Belajar Pasca Sarjana/ Doktorat
827.3	Izin Belajar Sarjana
827.4	Izin Belajar non gelar
827.5	Dalam Negeri
827.6	Luar Negeri
828	Mutasi Pegawai Instansi Lain
829	-
830	KEDUDUKAN Meliputi Penghitungan Masa Kerja, Penyesuaian Pangkat, Gaji, Penghargaan Ijazah dan Jenjang Pangkat
831	Perhitungan Masa Kerja
832	Penyesuaian Pangkat/ Gaji
832.1	Pegawai Golongan I
832.2	Pegawai Golongan II
832.3	Pegawai Golongan III
832.4	Pegawai Golongan IV
833	Penghargaan lainnya
834	Jenjang pangka/ eselonering
835	-
840	KESEJAHTERAAN PEGAWAI Meliputi :Tunjangan, Dana, Perawatan Kesehatan, Koperasi/ Distribusi, Perumahan/ Tanah, Bantuan Sosial, Rekreasi dan Dispensasi
841	Tunjangan
841.1	Jabatan
841.2	Kehormatan
841.3	Kematian
841.4	Tunjangan Hari Raya
841.5	Perjalanan Dinas tetap/ Cuti/ Pindah
841.6	Keluarga
841.7	Sandang, Uang makan, Papan, Pangan (Bapetarum)
841.8	Tunjangan Kinerja
842	Dana
842.1	Taspen
842.2	Askes, Bantuan Kesehatan
842.3	Bantuan Pendidikan
843	Perawatan Kesehatan
843.1	Poliklinik , Klinik Konsultasi
843.2	Perawatan Dokter
843.3	Obat-obatan
843.4	Keluarga Berencana
845	PERUMAHAN/ TANAH
845.1	Perumahan Pegawai
845.2	Tanah kapling
845.3	Insentif Perumahan
846	BANTUAN SOSIAL
846.1	Bantuan Melahirkan
846.2	Bantuan Menikah
846.3	Bantuan Sakit
846.4	Bantuan Advokasi
850	CUTI Meliputi Cuti Tahunanan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Hamil, Cuti Naik Haji, Cuti diluar Tanggungan Negara dan Cuti Alasan Lain
851	Cuti Tahunan
852	Cuti Besar



853	Cuti Sakit
854	Cuti Melahirkan
855	Cuti Ibadah Haji
856	Cuti Diluar Tanggungan Negara
857	Cuti Alasan Lain/ Alasan Penting
860	PENILAIAN Meliputi Penghargaan, Hukuman, Konduite, Ujian Dinas Penilaian Kekayaan Pribadi dan Rehabilitasi
861	Penghargaan
861.1	Bintang / Satya Lencana
861.2	Kenaikan Pangkat Anumerta
861.3	Kenaikan Gaji Istimewa
861.4	Hadiah Berupa Uang
861.5	Pegawai teladan
862	Hukuman
862.1	Proses penjatuhan hukuman
862.2	Tegoran lisan
862.3	Tegoran tertulis
862.4	Non Job
862.5	Penundaan Kenaikan gaji
862.6	Penurunan Pangkat
862.7	Pemindahan
862.8	Pemecatan
863	Konduite/ penilaian, DP3/ SKP ,disiplin pegawai
864	Ujian Dinas
864.1	Tingkat I
864.2	Tingkat II
864.3	Tingkat III
865	Penilaian Kehidupan Pegawai Negeri Meliputi : Petunjuk Pelaksanaan Hidup Sederhana, Penilaian Kekayaan Pribadi (Lp2p)
866	Rehabilitasi/ Pengaktifan Kembali
867	Penilaian Kinerja
867.1	Struktural
867.2	Fungsional
868	Rehabilitasi
870	TATA USAHA KEPEGAWAIAN
871	Formasi
872	Bezetting / Daftar Urut Kepegawaian
873	Registrasi, Sistem Informasi Kepegawaian
873.1	NIP
873.2	KARPEG
873.3	Legitimasi / Tanda Pengenal
873.4	Daftar Keluarga
873.5	KARSU / KARIS
874	Daftar Riwayat Pekerjaan
874.1	Tanggal Lahir
874.2	Penggantian Nama
874.3	Izin Kepartaian / Organisasi
875	Daftar Riwayat Pekerjaan
875.1	Kewenangan Mutasi Kepegawaian
875.2	Pelimpahan Wewenangan
875.3	Spesimen Tanda Tangan
876	Penggajian
877	Sumpah/ Janji
878	Korps Kepegawaian



880	PEMBERHENTIAN PEGAWAI Meliputi : Formasi besetting registrasi, Daftar riwayat hidup, Hak penggajian, Sumpah/janji dan Korps Pegawai
881	Atas Permintaan Sendiri / Pengunduran Diri
882	Dengan Hak Pensiun
882.1	Pemberhentian Dengan Hak Pensiun PNS Gol.I
882.2	Pemberhentian Dengan Hak Pensiun PNS Gol.II
882.3	Pemberhentian Dengan Hak Pensiun PNS Gol.III
882.4	Pemberhentian Dengan Hak Pensiun PNS Gol.IV
882.5	Pensiun Janda / Duda
882.6	Pensiun Yatim Piatu
882.7	Uang Muka Pensiun
883	Karena Meninggal (dalam Tugas)
884	Alasan Lain, Diantaranya Keuzuran Jasmani
885	Uang Pesangon
886	Uang Tunggu
887	Untuk Sementara
888	Tidak Dengan Hormat
890	PENDIDIKAN PEGAWAI Meliputi : Perencanaan, Pendidikan Reguler, Pendidikan Non Reguler, Pendidikan Keluar Negeri, Methode, Tenaga pengajar, Administrasi pendidikan, Fasilitas dan Sarana Pendidikan
890.1	Perencanaan Program, kurikulum, silabi, proposal dan Pelaporan Diklat
891	Pendidikan Prajabatan
892	Pendidikan Dalam Jabatan
892.1	Diklatpim
892.2	Diklat Teknis
892.3	Diklat Fungsional
893	Kursus-kursus ,Penataran , Bimbingan Teknis
894	Pengembangan Pegawai
894.1	Tugas Belajar
894.2	Ijin Belajar
894.3	Tunjangan Belajar
894.4	Bantuan Pendidikan
894.5	Penempatan Kembali
895	Metode
895.1	Kuliah
895.2	Ceramah , Symposium
895.3	Diskusi
895.4	Kuliah Lapangan / OL, Widya Wisata, KKN
895.5	Kurikulum
895.6	Karya Tulis
895.7	Penugasan
895.8	Permainan Peran
895.9	Gladi
896	TENAGA PENGAJAR
896.1	Usul Menjadi Tenaga Pengajar
896.2	Permintaan Tenaga Pengajar
896.3	Penambah Tenaga Pengajar
897	ADMISTRASI PENDIDIKAN
897.1	Tahun Pelajaran
897.2	Persyaratan, Pendaftar, testing Ujian
897.3	STTP
897.4	Penilaian Angka Kredit
897.5	Laporan Pendidikan dan pelatihan



898	FASILITAS BELAJAR
898.1	Tunjangan Belajar
898.2	Asrama
898.3	Uang Makan
898.4	Uang Transport
898.5	Uang Buku
898.6	Uang Ujian
898.7	Uang Semester/uang Kuliah
898.8	Uang saku
899	SARANA
899.1	Persediaan Buku
899.2	Bantuan Alat-Alat Tulis
899.3	Bantuan sarana Belajar lainnya
899.4	Perabot Kantor
899.5	Alat Angkutan
899.6	Pakaian Dinas
899.7	Inventaris
900	KEUANGAN
901	Nota Keuangan
902	APBN
903	APBD
904	Dana Alokasi Umum
905	Dana Alokasi Khusus
910	ANGGARAN
910.1	Keputusan tentang penunjukan pengelola keuangan SKPD / PPKD
910.2	Keputusan Gubernur tentang penunjukan pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD
911	Rutin
912	Pembangunan
913	Anggaran Belanja Tambahan
913.1	Daftar Isian Kegiatan
914	Daftar Isian Kegiatan (Dik)
914.1	Daftar Usulan Kegiatan (Duk)
915	Daftar Isian Proyek (Dip)
915.1	Daftar Usulan Proyek (Dup)
915.2	Daftar Isian Pengguna Anggaran (Dipa/ Dpa)
916	Revisi Anggaran
917	DPA / DPPA / DPAL-SKPD / PPKD
918	Anggaran Kas
919	Surat Penyediaan Dana (SPD)
920	OTORITAS
921	Laporan -laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
922	Rutin
923	Pembangunan
924	Siap
925	Ralat Sko
926	-
927	-
930	VERIFIKASI
931	Spm Rutin (Daftar P8)
932	Spm Pembangunan (Daftar P8)
933	Penerimaan (Daftar P6.7)
934	Spj Rutin
935	Spj Pembangunan
936	Nota Pemeriksaan
937	Sp Pemindehan Pembukuan



938	-
940	PEMBUKUAN
941	Penyusunan Perhitungan Anggaran
942	Permintaan Data Anggaran
943	Laporan Fisik Pembangunan
944	Penata Usaha Keuangan
945	Penyusunan Perhitungan Anggaran
946	Permintaan Data Anggaran
947	Laporan Fisik Pembangunan
948	-
949	-
950	PERBENDAHARAAN
951	Tuntutan Ganti Rugi (Icw Pasal 74)
952	Tuntutan Bendaharawan
953	Penghapusan Kekayaan Negara
954	Pengangkatan/ Penggantian Pemimpin Proyek Dan Pengangkatan/ Pemberhentian Bendaharawan
955	Specimen Tanda Tangan
956	Surat Tagihan Piutang, Ikhtisar Bulanan
957	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
958	Surat Penolakan Penerbitan SP2D
959	Daftar Penguji SP2D
960	PEMBINAAN KEBENDAHARAAN
961	Bimtek – bimtek / kursus yang berkaitan dengan keuangan
962	Pemeriksaan Kas Dan Hasil Pemeriksaan Kas
963	Pemeriksaan Administrasi Bendaharawan
964	Laporan Keuangan Bendaharawan
965	Evaluasi Dan Pengendalian
966	Tuntutan
966.1	Tuntutan Ganti Rugi
966.2	Tuntutan Perbandaharaan
967	Evaluasi dan Perubahan APBD Kabupaten / Kota
968	Evaluasi dan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten / Kota
969	Edaran-edaran
970	PENDAPATAN
971	Perimbangan Keuangan
971.1	Bagi Hasil Pajak
971.11	Pajak Bumi Bangunan (PBB)
971.12	Bela Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (PBHTB)
971.13	Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh Pasal 21)
971.2	Bagi Hasil Bukan Pajak
971.21	Sumber Daya Alam / Migas
972	Subsidi
973	Pajak
973.1	Pajak Kendaraan Bermotor
973.2	Pajak Kendaraan Diatas Air
973.3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
973.4	Pajak Pengendalian & Pemanfaatan Air Permukaan
973.5	Pajak Reklame
974	Retribusi
974.1	Retribusi Bidang Kesehatan
974.2	Retribusi Bidang Seni Budaya dan Pariwisata
974.3	Retribusi Bidang Perekonomian, Perindustrian dan Perdagangan (termasuk pasar)
974.4	Retribusi Bidang Pertanian dan Perternakan (termasuk pemotongan hewan)



974.5	Retribusi Bidang Perhubungan, Komunikasi Informasi dan Teknologi (termasuk trayek, kelebihan muatan, telekomunikasi,
974.6	Retribusi Bidang Perkebunan dan Kehutanan (termasuk lintas dan lelang hasil hutan, flora fauna dll)
974.7	Retribusi Bidang Perikanan dan Kelautan
974.8	Retribusi Bidang Pertambangan, Pemanfaatan Air permukaan dan metrologi
974.9	Retribusi Bidang Lainnya (termasuk sampah)
975	Bea
975.1	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
975.2	Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air
976	Cukai
977	Pungutan
978	Bantuan
978.1	Bantuan Presiden
978.2	Bantuan Menteri
978.3	Bantuan Gubernur
978.4	Bantuan Bupati
978.5	Bantuan Lainnya
979	Pendapatan Lainnya
979.1	Hasil penjualan asset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
979.11	Pelepasan Hak Atas Tanah
979.12	Penjualan Rumah Jabatan / Rumah Dinas
979.13	Penjualan Kendaraan Dinas Roda 2
979.14	Penjualan Kendaraan Dinas Roda 4
979.15	Penjualan Bongkaran Bangunan Dan Inventaris
979.16	Penjualan Drum Bekas
979.17	Penjualan Hasil Penebangan Pohon
979.2	Penerimaan Jasa Giro
979.21	Jasa Giro Kas Daerah
979.22	Jasa Giro Pemegang Kas
979.23	Jasa Giro Khusus
979.3	Penerimaan Bunga Bank
979.31	Bunga Deposito
979.32	Bunga Tabungan
979.4	Penerimaan Ganti Rugi Atas Kerugian Atau Kehilangan Kekayaan Daerah (TP-TGR)
979.41	Sumbangan Pihak Ke Tiga
979.42	Sumbangan Pihak Ke Tiga Kendaraan (Daeler)
979.43	Sumbangan Pihak Ke Tiga Kayu
979.5	Penerimaan Lain-lain
979.51	Penerimaan Kembali Kredit Bank BKK
979.52	Ternak Tidak Layak Bibit
979.53	Sewa Internet
979.54	Penerimaan Dari Dana Bergulir / Revolving
979.55	Kerjasama Dengan BUMIDA
979.56	Penerimaan Duks
979.57	Tempat Rekreasi Nusakambangan
979.58	Seteron TP-TGR
979.59	Penerimaan Lainnya dari Setda / SKPD
979.6	Dekonsentrasi
979.7	Hibah
979.71	Hibah Pemerintah
979.72	Hibah Luar Negeri
979.73	Hibah Swasta / Perorangan
979.8	Bantuan Luar Negeri



979.9	Utang Negara / Daerah
980	PENGELOLAAN KAS DAERAH
981	Laporan Pemotongan IWP, Taperum, PPh 21 dari gaji
982	Laporan rekapitulasi penerimaan daerah
983	Daftar pemotongan dan penyetoran pajak (PPN / PPh) dari CV/ PT Instansi
984	Surat tanda setoran (STS)
985	Laporan Realisasi Daerah
985.1	Laporan Realisasi Penerimaan Daerah
985.2	Laporan Realisasi Pengeluaran Daerah
986	Rekonsiliasi
986.1	Surat Rekonsiliasi Penerimaan
986.2	Laporan Rekonsiliasi Bank
987	Laporan Mutasi Penempatan Deposito
988	Surat Perintah Transfer Uang (SPTU)
989	-
990	BENDAHARAWAN
991	SKPP
992	Teguran SPJ
993	Laporan SPJ
994	
995	

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN BALANGAN**



H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

